

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 25 September 2015 organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi bersama negara-negara anggota PBB berkomitmen menetapkan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pengembangan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah ditetapkan oleh negara-negara sejak tahun 2001. *Sustainable Development Goals* dibentuk untuk menjawab tantangan global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan menjaga lingkungan sehingga meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang di seluruh dunia dalam bentuk aksi nyata. *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdiri dari 17 tujuan dan 169 target rencana aksi global untuk 15 tahun kedepan yang dimulai dari tahun 2015-2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG) menangani tantangan global yang dihadapi dunia, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, perubahan iklim, penghancuran lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Tujuan kelima SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Tujuan ini bukan hanya hak asasi manusia yang penting, tetapi juga dasar bagi dunia yang damai, kaya, dan berkelanjutan (United Nations 2020).

PBB telah menetapkan beberapa target untuk mencapai pemberdayaan perempuan. Salah satu tujuan adalah memastikan bahwa perempuan terlibat secara efektif dalam masyarakat dan memberi mereka kesempatan yang adil

untuk memegang peran kepemimpinan di berbagai tingkatan pengambilan keputusan, baik dalam ranah publik, ekonomi dan politik. Tujuan kedua adalah menjamin akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan hak kepemilikan secara adil. Tujuan terakhir adalah penerapan kebijakan dan hukum untuk mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di semua tingkatan (United Nations 2020).

Isu gender menjadi salah satu kajian penting yang mengalami banyak perkembangan dan memengaruhi peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan suatu negara (Mariah, Rustam, and Wahyudin 2022). Gender merupakan salah satu isu sosial yang berfokus pada peran, hak, dan partisipasi perempuan dalam struktur sosial (Putra 2023). Pembangunan pariwisata berkelanjutan berperan penting dalam memberdayakan perempuan dan melibatkan mereka secara aktif dalam industri pariwisata. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kelima, yaitu mewujudkan kesetaraan gender. Pariwisata diyakini sebagai salah satu sektor kunci yang dapat membantu pencapaian target tersebut dan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (The World Bank 2018). Konsep kesetaraan gender memberikan perempuan diberikan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi serta kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan (The World Bank 2018).

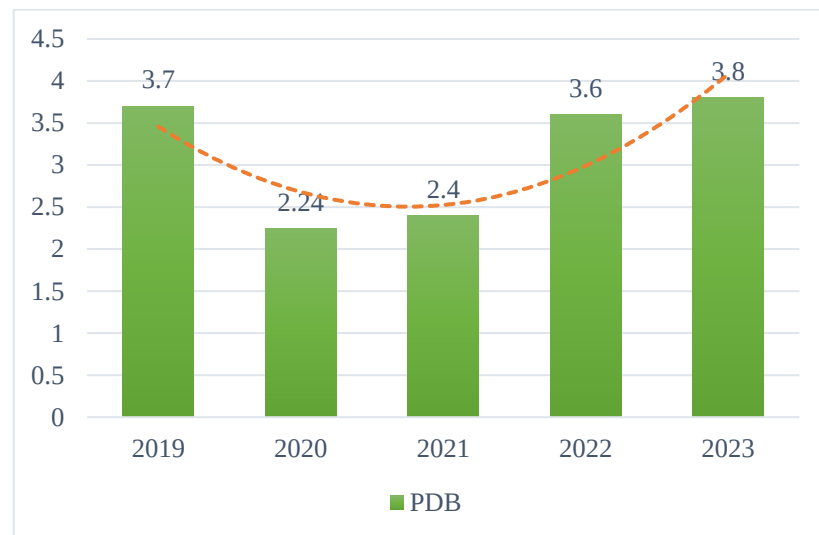
Namun, di Indonesia masih terjadi kesenjangan dan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dari sistem struktur sosial budaya (Meo and Boro 2021). Selain itu, beberapa destinasi masih menghadapi masalah gender karena

norma konvensional yang membatasi perempuan yang bekerja di sektor pariwisata, seperti kesenjangan gaji atau upah, pembatasan partisipasi politik atau bersuara, stereotip gender, dan diskriminasi gender, yang menyebabkan ketidakadilan gender (Putra 2023). Peran perempuan dalam sektor pariwisata dapat dilihat dari sejauh mana mereka merasa memiliki kendali atas keputusan yang diambil, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan kerja. Pemberdayaan ini mencakup aspek psikologis, seperti rasa percaya diri dan motivasi, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan sosial. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) ini adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (Judiasih 2022). Pengarusutamaan gender bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan di tingkat daerah.

Salah satu wujud afirmatif yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan kesetaraan gender adalah dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam arena publik dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender melingkupi berbagai sektor, tidak hanya sektor kelembagaan melainkan juga sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor yang mendukung pembangunan nasional salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata mempunyai

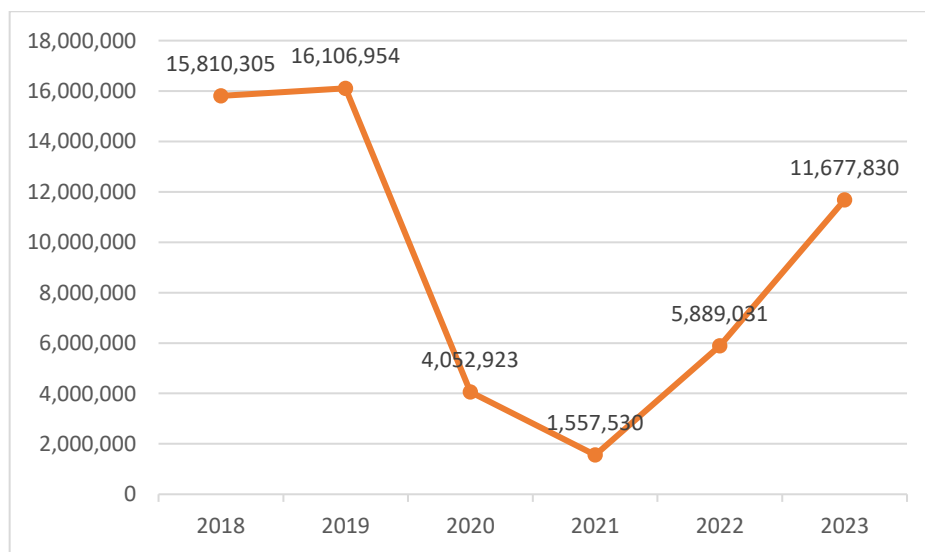
dampak signifikan terhadap perekonomian global, masyarakat lingkungan hidup dan faktor berkelanjutan lainnya. Oleh karena itu, pariwisata menjadi alat penting untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Sektor pariwisata telah berkembang menjadi komponen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memainkan peran penting dalam pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, perdamaian dan keamanan, penciptaan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan meningkatkan tarap hidup masyarakat (Prasodjo 2017). Saat ini pariwisata telah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Indonesia dan pengembangan nasional. Kontribusi sektor pariwisata pada Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini tentang grafik kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB 2019-2023:



Gambar 1.1 Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB 2019-2023
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024

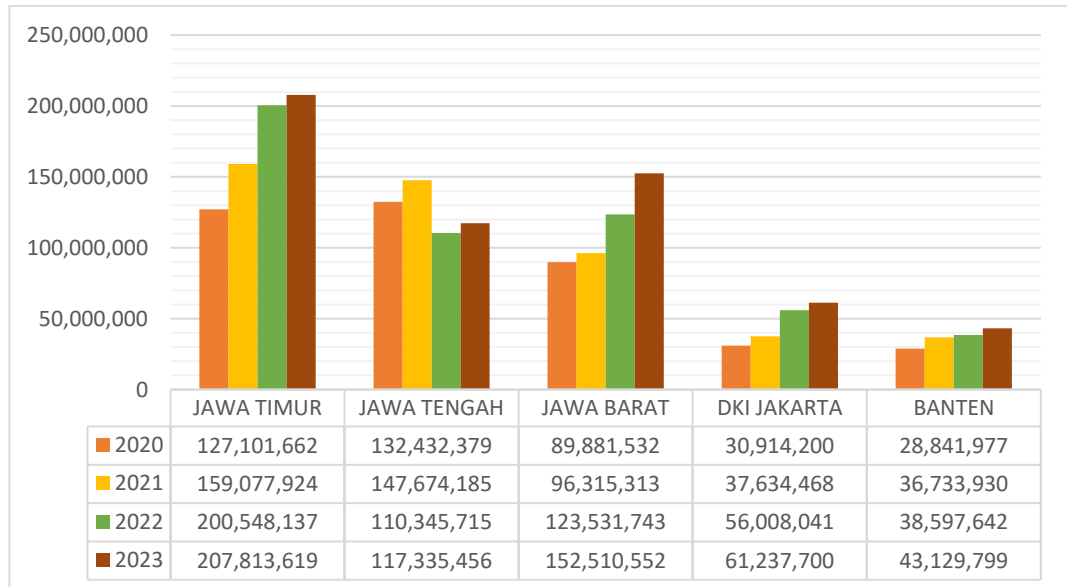
Gambar 1.1 menggambarkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB mengalami penurunan selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021. Namun, pada tahun 2022, kontribusi sektor pariwisata mulai mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 0,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kontribusi PDB berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.



Gambar 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2018-2023
Sumber: BPS Indonesia, 2024

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat jumlah kunjungan wisman hanya mencapai 11.677.830 wisatawan. Jumlah ini mengalami peningkatan hampir 98,30% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman di tahun 2022. Saat ini Indonesia telah berhasil melewati tantangan pandemi covid-19. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu cara pemerintah Indonesia melewati tantangan tersebut dengan cara

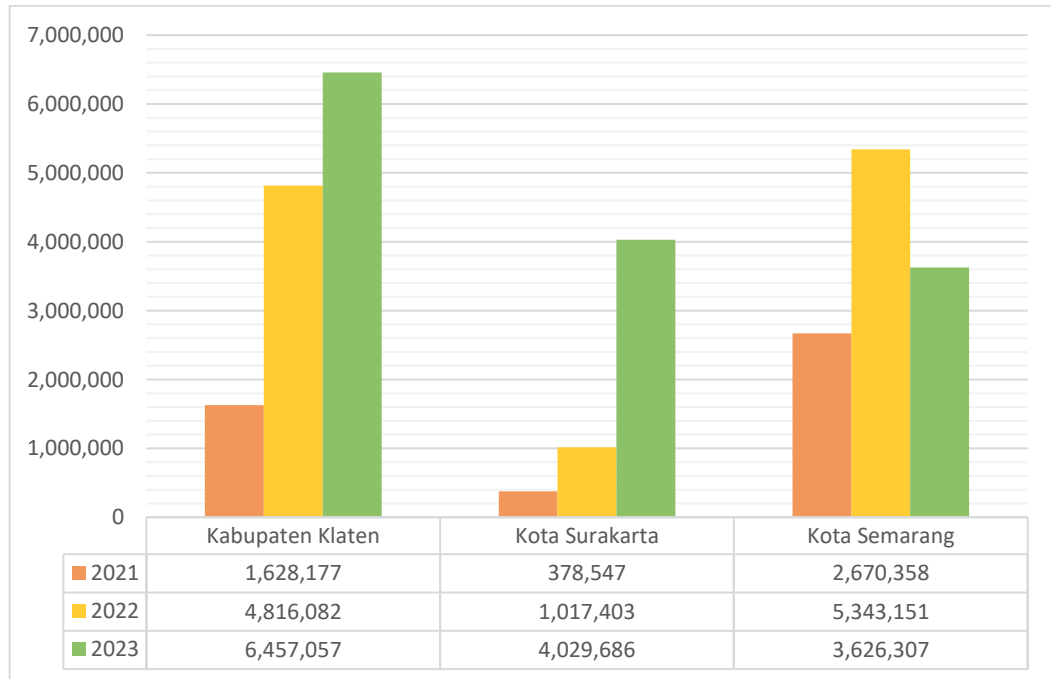
mengeluarkan beberapa kebijakan pembatasan perlintasan bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia.



Gambar 1.3 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2020-2023 (Provinsi)
Sumber: BPS, 2024

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan nusantara mengalami tren peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam gambar tersebut, lima provinsi dengan jumlah perjalanan wisatawan tertinggi di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Di antara kelima provinsi ini, Jawa Tengah menunjukkan pola jumlah wisatawan yang fluktuatif, berbeda dengan provinsi lainnya yang cenderung lebih stabil. Tahun 2020-2021 Jawa Tengah mendapatkan peringkat kedua kemudian turun menjadi peringkat ketiga di tahun 2022-2023 setelah Provinsi Jawa Barat. Walaupun kunjungan wisatawan nusantara mengalami kenaikan di tahun 2021, namun jumlah pengunjung di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan di tahun 2022 dan naik hanya naik 3% di tahun 2023. Provinsi Jawa Tengah memiliki

berbagai daya tarik wisata dan *event* untuk menarik wisatawan untuk berkunjung.

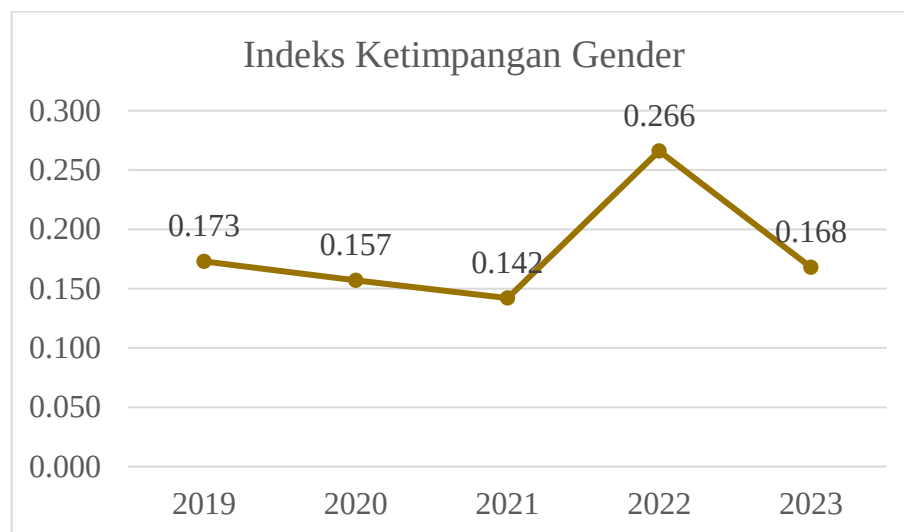


Gambar 1.4 Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata dan *Event* Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2023 berdasarkan data kunjungan dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah, terdapat tiga wilayah kabupaten/kota yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan tertinggi dari 35 kabupaten dan kota. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten menduduki peringkat pertama sebanyak 6.457.057 wisatawan sebagai daerah yang memiliki kunjungan wisatawan paling tinggi, tempat kedua diduduki oleh Kota Surakarta sebanyak 4.029.686 sedangkan ditempat ketiga ada Kota Semarang sebanyak 3.626.307 wisatawan. Akan tetapi dari ketiga wilayah tersebut Kota Semarang mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2023 sebesar 32% dibandingkan tahun

sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta yang selalu mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisatawan.

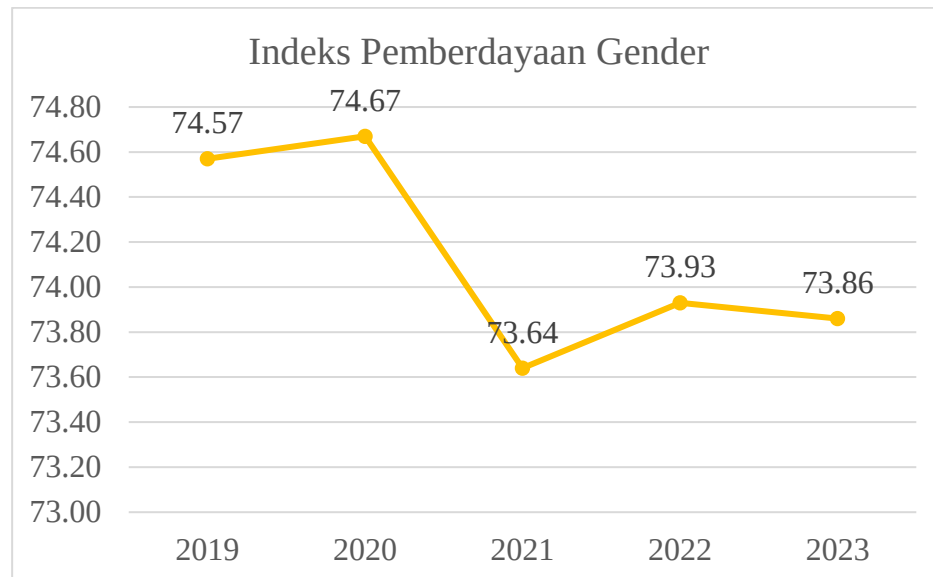
Selain itu, kunjungan wisatawan yang menurun Kota Semarang juga mengalami penurunan pada indeks ketimpangan gender dan indeks pemberdayaan gender. Untuk menilai keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia serta mengevaluasi hasil pembangunan dari perspektif gender, salah satu alat ukur yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang belum sepenuhnya dianggap sebagai strategi utama dalam mencapai kesetaraan gender.



Gambar 1.5 Indeks Ketimpangan Gender Kota Semarang
Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

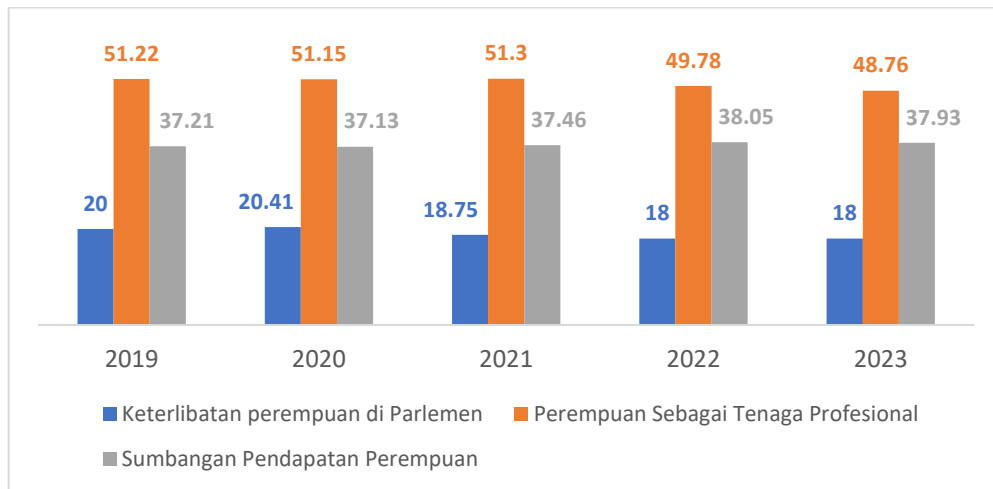
Jika dilihat dari indeks ketimpangan gender pada tahun 2023 Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 0.098 dibandingkan tahun

sebelumnya. Sedangkan untuk indeks pemberdayaan gender turun sebesar 0.07 daripada tahun 2022.



Gambar 1.6 Indeks Pemberdayaan Gender
Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Berdasarkan data BPS Kota Semarang gambar 1.6 menunjukkan bahwa indeks ketimpangan gender di Kota Semarang pada tahun 2022 Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi Kota Semarang belum bisa mempertahankan indeks tersebut terbukti pada tahun 2023 indeks pemberdayaan gender di Kota Semarang mengalami penurunan. Hal ini dapat diartikan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Semarang masih fluktuatif. Indeks pemberdayaan gender diukur dari jumlah perempuan yang berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks ini juga berfokus pada partisipasi perempuan, dengan mengukur ketimpangan gender dalam bidang ekonomi, keterlibatan politik, dan proses pengambilan keputusan.



Gambar 1.7 IDG Kota Semarang 2023
Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Gambar 1.7 menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Semarang mencakup tiga aspek utama yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Dari ketiga aspek tersebut, hanya keterlibatan perempuan di parlemen yang menunjukkan stabilitas, sedangkan dua aspek lainnya, yaitu perempuan sebagai tenaga profesional dan kontribusi pendapatan perempuan, mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan gender yang signifikan di Kota Semarang. Penurunan jumlah perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional mengindikasikan bahwa akses dan kesempatan bagi perempuan dalam sektor profesional masih terbatas, sehingga turut berkontribusi pada menurunnya Indeks Dimensi Gender (IDG). Selain itu, penurunan kontribusi pendapatan perempuan terhadap total pendapatan keluarga menunjukkan keterbatasan akses perempuan terhadap peluang ekonomi. Kesenjangan ini semakin memperburuk ketimpangan gender, khususnya dalam dimensi ekonomi, dan secara keseluruhan berdampak negatif

pada IDG. Ketimpangan ini disebabkan karena adanya kesenjangan akses dan kemampuan memanfaatkan informasi dan komunikasi teknologi antara laki-laki dan perempuan, sehingga upaya mencapai kesetaraan gender masih menjadi tantangan (Arbarini, Desmawati, and Budiartati 2019). Dengan demikian, untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam bidang pariwisata, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung dan mengembangkan sektor ini. Salah satu bentuk nyata dari kesetaraan gender dalam bidang pariwisata adalah melalui pembangunan desa wisata, yang melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam pengelolaan dan pengembangannya. Desa wisata menjadi salah satu langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di era globalisasi saat ini. Desa wisata merupakan salah satu bentuk pariwisata yang memanfaatkan kearifan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal yang berbasis pada prinsip keberlanjutan serta pembagian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan (Rahmat and Apriliani 2022).

Pada proses pengembangan desa wisata harus memenuhi aspirasi dan kebutuhan perempuan. Oleh karena itu, perempuan harus bersedia terlibat dalam pengembangan desa. Kehadiran gerakan yang menyadari turis memberikan kesempatan yang baik bagi wanita untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa mereka. Terutama, ketika perkembangan masyarakat desa

lebih cepat dan kompleks yang menuntut komitmen perempuan untuk selalu belajar, mengikuti, dan mengantisipasi kemajuan pembangunan. (Kinnaird & Hall, 1994). Oleh karena itu, integrasi gender perlu dilakukan.

Hampir di seluruh daerah di Indonesia memiliki desa-desa wisata yang sangat berpotensi. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pengembangan pariwisata melalui desa wisata yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah. Termasuk Kota Semarang yang juga memiliki beberapa desa wisata. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 tanggal 21 Desember tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang menetapkan 3 (tiga) kelurahan yang ada di Kota Semarang menjadi desa wisata yakni Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit yang ada di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen yang ada di Kelurahan Wonolopo. Sejak penetapan surat keputusan tersebut sampai saat ini (tahun 2022) Desa Nongkosawit ini belum mengalami perkembangan yang cukup signifikan bahkan pengembangan pariwisatanya masih tertinggal dengan Desa Wisata Wonolopo dan Desa Wisata Kandri. Dikutip dari dokumen Pokdarwis Pandanaran Kelurahan Kandri pada tahun 2018 Kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Kandri sejumlah 12.415 orang, Desa Wisata Wonolopo 5.769 orang sedangkan untuk Desa Wisata Nongkosawit belum melakukan pendataan kunjungan wisatawan dan baru melakukannya pada tahun 2019. Jadi dapat dikatakan bahwa Desa Wisata Nongkosawit ini pengembangannya masih cukup tertinggal dengan desa wisata lainnya.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Wisatawan Desa Wisata di Kota Semarang

Tahun	Desa Wisata Kandri	Desa Wisata Wonolopo	Desa Wisata Nongkosawit
2016	6.787	4683	N/A
2017	8.863	5024	N/A
2018	12.415	5769	N/A
2019	12.662	N/A	278
2020	3925	N/A	77
2021	1407	N/A	80
2022	5.623	3.215	16
2023	5.000	250	217

Sumber: Data diolah peneliti pada tahun 2024

Desa Wisata Nongkosawit merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 240.756 Ha. Desa wisata ini memiliki keunikan yang tidak ditemukan di desa lain, seperti makanan khas, seni tradisional, dan keindahan alam. Selain itu, kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai-nilai agama yang menjadi bagian dari kearifan lokal. Dengan kearifan lokal yang dimiliki desa wisata juga harus memiliki fasilitas pendukung, seperti akomodasi atau penginapan, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan, dan fasilitas lainnya. Namun, sejak diresmikan pada tahun 2012 hingga tahun 2024, perkembangan Desa Wisata Nongkosawit masih terbatas. Banyak potensi alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan desa ini belum memiliki identitas serta kegiatan wisata yang menonjol. (Yuliati and Suwandono 2016). Namun, pengembangan Desa Wisata Nongkosawit saat ini belum dilakukan secara optimal dan usaha pengembangan desa wisata belum memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Wisata Nongkosawit. Padahal dalam beberapa tahun terakhir *sustainable tourism development* ini digunakan sebagai

pengembangan pariwisata dan telah menjadi harapan semua pelaku pariwisata di destinasi wisata di dunia (Junaid 2019).

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya alam serta budaya lokal secara berkelanjutan (Richins 2009). Selain itu, kualifikasi dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan desa wisata masih tergolong rendah (Purnomo et al. 2020). Terdapat pokdarwis yang paling berpengaruh dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit namun pengelolaan dan tata kelola lembaganya masih belum tertata dengan baik yang disebabkan karena kepentingan masing-masing anggota. Selain itu, belum ada peraturan pemerintah mengenai *sustainable tourism* (Hidayati, Yuniningsih, and S 2023).

Dalam pengembangan pariwisata, peran perempuan memiliki arti yang sangat penting. Perempuan memegang peran strategis, baik sebagai ibu rumah tangga yang menjadi pengelola utama keluarga maupun dalam peran yang lebih luas di masyarakat. Kontribusi perempuan dapat menjadi kekuatan dalam memajukan sektor pariwisata, khususnya pada desa wisata. Proses pengembangan desa wisata harus dirancang untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan perempuan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal. Dengan melibatkan perempuan, desa wisata tidak hanya akan menjadi lebih inklusif tetapi juga lebih inovatif, karena perempuan sering membawa perspektif baru yang mendukung keberlanjutan dan daya tarik pariwisata. Dengan demikian, perempuan perlu mengambil inisiatif untuk melibatkan diri

dalam membangun desa wisata. Partisipasi aktif perempuan akan mendorong terciptanya desa wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender. Kehadiran gerakan sadar wisata memberikan peluang yang signifikan bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan desanya. Hal ini menjadi semakin relevan ketika perkembangan masyarakat desa semakin pesat dan kompleks, sehingga menuntut komitmen perempuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengantisipasi kemajuan pembangunan (Kinnaird & Hall, 1994). Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi langkah penting yang harus diwujudkan. Meskipun berbagai kebijakan dan perjanjian internasional telah menekankan perlindungan hak asasi manusia, kenyataannya perempuan masih menghadapi keterbatasan akses dibandingkan laki-laki, terutama dalam hal pekerjaan, pelatihan, kepemilikan properti, dan berbagai peluang lainnya. Upaya nyata diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan perempuan mendapatkan hak yang setara dalam semua aspek pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata.

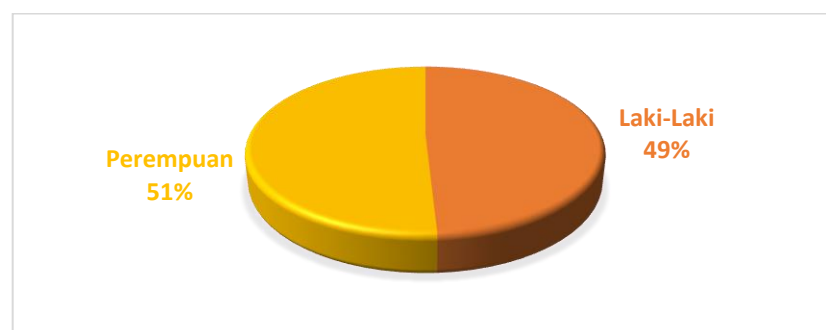
Dalam pengembangan desa wisata tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat setempat. Menurut Sastrodipoetro dalam (Ibori 2013), partisipasi masyarakat berarti keterlibatan yang muncul secara spontan, didasarkan pada kesadaran, serta disertai rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Dengan adanya partisipasi ini, masyarakat berperan penting dalam mendukung dan mewujudkan tujuan bersama dalam pengembangan desa wisata. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih

belum optimal dan hanya pada tingkatan *delegated power* atau pemberian kewenangan atau semacam hak veto untuk mengurus dirinya sendiri (Impiansari and S 2018). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih terbatas, terutama hanya melibatkan sebagian warga di Dusun Randusari. Salah satu tantangan utama yang menghambat perkembangan desa wisata ini berasal dari faktor eksternal, yaitu belum terjalinnnya kerja sama resmi dengan pihak swasta. Hingga saat ini, desa wisata tersebut belum mendapatkan dukungan melalui program CSR atau swasta (Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman 2022). Selain itu, aktivitas wisata di desa ini masih kurang terbuka bagi masyarakat luas. Hanya kelompok tertentu yang terlibat dalam kegiatan wisata, sementara sebagian besar warga Desa Wisata Nongkosawit bahkan mengetahui bahwa Kelurahan Nongkosawit merupakan desa wisata yang telah ditetapkan menjadi wisata Kota Semarang.

Di dalam partisipasi masyarakat terdapat perempuan yang ikut serta dalam pengembangan pariwisata. Dalam hal partisipasi perempuan, penting untuk mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam menentukan siapa yang layak menerima apa dalam sistem ekonomi, khususnya dalam pembangunan (Gusti and Enda 2021). Perempuan dapat dijadikan subjek dalam pengembangan pariwisata dengan potensi yang dimiliki perempuan itu sendiri. Guna mencapai kesetaraan gender maka dibutuhkan suatu strategi. Strategi pengarusutamaan gender adalah langkah penting dalam kebijakan pembangunan perumahan untuk memastikan kebutuhan yang beragam dapat terakomodasi dan manfaat dari program peningkatan kualitas hunian dapat dirasakan secara merata oleh

seluruh penerima bantuan (Bradshaw, Chant, and Linneker 2017; Meier and Lombardo 2013). Menurut Chen, Vanek, and Carr (2004) kesetaraan gender adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya mengatasi kemiskinan, karena baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan miskin memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam proses tersebut. Pengarusutamaan gender ini juga didukung dengan regulasi pemerintah Kota Semarang yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021. Pelaksanaan pengarusutamaan gender ini dapat dilihat dari indeks ketimpangan gender (IKG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).

Dalam bidang pariwisata membutuhkan seluruh partisipasi masyarakat dalam pembangunannya. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam pengembangan pariwisata (Prananda and Banyuwangi 2018). Desa Wisata Nongkosawit sudah berdiri sejak lama, dan sangat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat di dalamnya.



Gambar 1.8 Jumlah Penduduk Desa Wisata Nongkosawit 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Kelurahan Nongkosawit, 2024

Jumlah seluruh penduduk Desa Wisata Nongkosawit berjumlah 5.814 jiwa. Desa Wisata Nongkosawit memiliki jumlah penduduk perempuan (2.958 jiwa) lebih banyak daripada penduduk laki-laki (2.856 jiwa) dengan rasio jenis kelamin 96,55. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut berdasarkan mata pencaharian, masyarakat yang ikut berpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan maupun pengembangan pariwisata hanya beberapa saja. Sebagian besar warga Kelurahan Nongkosawit bermata pencaharian sebagai buruh tani, petani, peternak, dan wiraswasta (Pamungkas and Priyadi 2018). Hal ini disebabkan karena mata pencaharian yang cenderung tidak menghabiskan waktu dan fleksibel cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam suatu program dibandingkan dengan mereka yang bekerja seharian penuh (Prananda and Banyuwangi 2018). Sehingga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata hanya sedikit. Namun pelibatan perempuan dalam pengembangan pariwisata masih sedikit sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit sebagai berikut:

Tabel 1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata

No	Jenis Partisipasi	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki		Perempuan	
		Jumlah	Presentase (%)	Jumlah	Presentase (%)
1	Pengurus Pokdarwis	7	70	3	30
2	Pelaku Wisata	26	59	18	41

Sumber: Data diolah pada tahun 2024

Masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama kaum perempuan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit adalah karena kurangnya tingkat pendidikannya. Pendidikan adalah bagian mendasar dalam kehidupan

manusia yang memungkinkan mereka mencapai kemajuan di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan moralitas (Fitriyah 2018). Menurut Mangkunegara, tingkat pendidikan merupakan proses yang berlangsung dalam jangka panjang dengan metode yang sistematis dan terstruktur. Dalam proses ini, tenaga kerja manajerial mempelajari berbagai konsep dan teori untuk mencapai tujuan secara umum (Fitriyah 2018). Dapat diartikan bahwa pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi dan membangun proses pemberdayaan. Berikut ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Wisata Nongkoosawit:

Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan di Desa Wisata Nongkosawit

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1	Belum Sekolah	179	3.9%
2	Tidak Tamat SD	1,162	25.5%
3	Tamat SD	504	11.1%
4	Tamat SLTP/Sederajat	873	19.2%
5	Tamat SLTA/Sederajat	1,363	30%
6	Tamat Akademi/Sederajat	130	2.9%
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	338	7.4%
Jumlah		4,549	100%

Sumber : Data Monografi Desa Nongkosawit, 2024

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Wisata Nongkosawit masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan 25,5% penduduk tidak tamat SD dan 11,1% hanya tamat SD. Hal ini mencerminkan bahwa akses pendidikan di desa ini masih menjadi tantangan yang signifikan. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut dapat berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi desa wisata secara optimal, seperti dalam pengelolaan usaha, pemasaran, dan pengembangan inovasi. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan

masyarakat, terutama dalam bidang keterampilan yang relevan dengan pariwisata.

Berdasarkan pernyataan di atas, partisipasi perempuan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit masih belum optimal. Padahal menurut informasi dari ketua Pokdarwis Kandhang Gunung mengatakan bahwa pokdariws telah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya untuk semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Namun, kehadiran desa pariwisata diharapkan akan meningkatkan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengembangan pariwisata berdasarkan pengarusutamaan gender di Desa Nongkosawit Kota Semarang. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah “Mengapa pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Nongkosawit Kota Semarang masih belum optimal?”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengembangan pariwisata Desa Nongkosawit belum optimal terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan Desa Nongkosawit yang paling sedikit dibandingkan Desa Wisata Wonolopo dan Desa Wisata Kandri.
2. Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih rendah.

3. Partisipasi perempuan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit masih rendah.
4. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Wisata Nongkosawit belum baik sehingga mempengaruhi proses partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

1.3 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pengembangan Pariwisata Berbasis Pengarusutamaan Gender Di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang”. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pemberdayaan perempuan dan faktor pendukung serta faktor penghambat pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender.

1.4 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.
- b. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu administrasi publik khususnya terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis pengurusanataamaan gender di desa wisata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan mempraktikkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sehingga akan bermanfaat serta meningkatkan *soft skill* di dunia riset.

b. Bagi Pemerintah

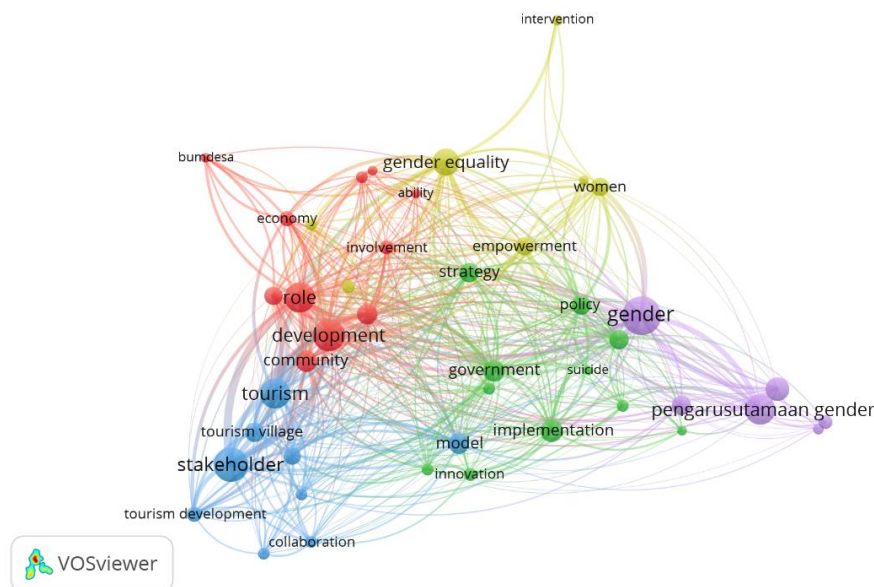
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengelola desa wisata dan *stakeholder* terkait dalam manajemen kegiatan pariwisata.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk menemukan *state of the art* dari bidang penelitian yang menjadi fokus studi. Dalam penelitian ini, sebanyak 126 artikel digunakan sebagai bahan analisis untuk mengidentifikasi *state of the art* terkait. Artikel-artikel tersebut dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer, yang membantu

memvisualisasikan keterkaitan antar tema, kata kunci, dan pola kolaborasi di dalam literatur yang dikaji. Berikut adalah hasil analisis menggunakan VOSviewer yang telah diolah oleh peneliti:



Gambar 1.9 Visualisasi Jaringan
Sumber: Hasil analisis melalui VOSviewer, 2024

Berdasarkan gambar 1.9 visualisasi jaringan (*network visualization*) diketahui terdapat 44 konsep dari 126 artikel yang telah diidentifikasi berhubungan dengan tema pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di desa wisata. Dari analisis tersebut terdapat 5 kluster dengan warna berbeda satu sama lain dan teridentifikasi daftar konsep yang dominan diteliti di masing-masing kluster. Berdasarkan gambar 1.9 diketahui kluster 1 ditandai warna bulatan merah dengan 11 kata kunci seperti BUMDes, *economy*, *ability*, *community*, *condition*, *development*, *disaster*, *factor*, *involment*, *management*, *role*. Kluster 2 (warna hijau) terdiri dari 11 kata kunci seperti *culture*, *environetment*, *gender mainstreaming*

policy, government, implementation, innovation, institution, policy, program, strategy, suicide. Kluster 3 (warna biru) dengan 9 kata kunci meliputi *collaboration, model, partnership, stakeholder, sustainability, sustainable tourism, tourism, tourism development*, dan *tourism village*. Kluster 4 (warna kuning) terdiri dari 7 kata kunci seperti *child protection, empowerment, equality, gender equality, intervention, sustainable development goal*, dan *women*. Kluster 5 (warna ungu) dengan 6 kata kunci seperti desa, gender, masyarakat, partisipasi, pengarusutamaan gender, dan responsif gender. Adapun artikel yang relevan tema penelitian ini akan ditulis dalam bentuk ringkasan paragraf dan tabel penelitian terdahulu baik dari jurnal nasional maupun internasional. Berikut ini beberapa penjelasan penelitian terdahulu tabel penelitian terdahulu (terlampir).

Gusti and Enda (2021) dalam artikel menganalisis partisipasi perempuan dalam pengembangan Wisata Desa dengan menggunakan teori partisipasi milik David C Korten menjelaskan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat harus dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam penelitian ini, teori gender juga digunakan untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam pengembangan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan telah berpartisipasi secara mandiri, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam seluruh proses. Dalam tahap perencanaan, keterlibatan perempuan masih minim. Namun, pada tahap pelaksanaan, peran perempuan lebih terlihat, seperti dalam penyediaan penginapan, praktik membatik dalam acara wisata, dan pengelolaan paket

wisata. Sedangkan analisis gender partisipasi perempuan di sektor publik masih berkaitan dengan pekerjaan domestik yang biasa mereka lakukan, tetapi kini memiliki peran lebih luas dalam pelayanan publik.

Selanjutnya, penelitian **Putra (2023)** membahas bagaimana kebijakan pengarusutamaan gender diterapkan dalam pengelolaan objek wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III, yang mencakup berbagai aspek seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana kebijakan, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan ini, terbatasnya anggaran, serta dampak pandemi Covid-19 yang semakin memperumit pelaksanaannya.

Kartiwi et al. (2022) meneliti tentang aspek politik dan inovasi dalam bidang pariwisata di Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode *mix method*. Penelitian ini menggunakan teori intervensi pemerintah desa terhadap pemberdayaan perempuan, yang mencakup pengambilan keputusan, akses terhadap anggaran desa, kebijakan sosial untuk perempuan, dan kewirausahaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Nglanggeran telah melaksanakan pengembangan dan inovasi yang berdampak positif pada kesejahteraan warga. Inovasi ini berawal dari ide masyarakat, tetapi melibatkan peran berbagai pemangku

kepentingan dalam pelaksanaannya. Dampak positif terlihat pada peningkatan pendapatan warga yang terlibat di sektor wisata dan UMKM. Warga lain juga merasakan manfaat, seperti perbaikan infrastruktur desa. Selain itu, perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam perencanaan program desa wisata dan mendapat pengembangan kapasitas yang memadai.

Hasnawati et al. (2017) dalam artikelnya menganalisis pengembangan desa wisata berbasis gender di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Policy Outlook for Planning* (POP). Dalam penelitian tersebut teori yang digunakan adalah tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu analisis gender, integrasi gender, penyusunan rencana aksi dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mendukung pariwisata pedesaan perempuan perlu dikonsolidasikan dalam organisasi berdasarkan aktivitas ekonomi. Organisasi ini harus berpartisipasi dalam proses pengaturan rencana aksi pariwisata pedesaan di Batanghari Ogan. Kegiatan ini hanyalah titik permulaan untuk memungkinkan perempuan di Batanghari Ogan, yang membutuhkan pendekatan yang lebih praktis untuk meningkatkan kapasitas perempuan di Batanghari Ogan, khususnya untuk mendukung pengembangan pariwisata pedesaan di Batanghari Ogan.

Kemudian penelitian mengenai strategi awal dalam pengembangan pemberdayaan perempuan di wilayah pembangunan pariwisata perbatasan dari **Arieta et al. (2022)** teori yang digunakan adalah Pengarusutamaan

Gender (PUG), yang mencakup aspek perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Strategi pemberdayaan dan penguatan sumber daya manusia dilakukan melalui kemitraan, pendidikan, dan pelatihan. Model PUG melibatkan dimensi akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi. Studi awal menunjukkan belum adanya inisiatif PUG di sektor pembangunan wisata perbatasan di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, sehingga perempuan memiliki keterbatasan akses dan partisipasi dalam pembangunan. Hal ini menegaskan perlunya evaluasi penerapan PUG dalam pembangunan berkelanjutan daerah.

Nurhaeni et al. (2017) dalam artikelnya menganalisis disparitas gender dalam pembangunan pariwisata ramah lingkungan, mencakup aspek keterlibatan, kompetensi, serta hambatan internal dan eksternal bagi perempuan dan laki-laki. Penelitian ini menggunakan teori Disparitas Gender yang meliputi tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan adanya ketimpangan gender, di mana perempuan cenderung lebih termarginalkan, khususnya dalam tahap pelaksanaan. Kompetensi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan mereka menghadapi hambatan internal maupun eksternal yang lebih besar.

Setelah itu, penelitian kualitatif dari **Fitriana, Sujana, and Leonandri (2020)** meneliti partisipasi perempuan dalam aktivitas pariwisata di suku Baduy Luar berdasarkan empat komponen pariwisata: atraksi, amenitas,

aksesibilitas, dan penunjang. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa perempuan hanya berpartisipasi dalam dua komponen, yaitu atraksi dan amenitas. Pada komponen atraksi, tingkat partisipasi perempuan hampir setara dengan laki-laki. Namun, keterbatasan partisipasi perempuan secara keseluruhan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang telah tertanam dan diterima dalam masyarakat mereka.

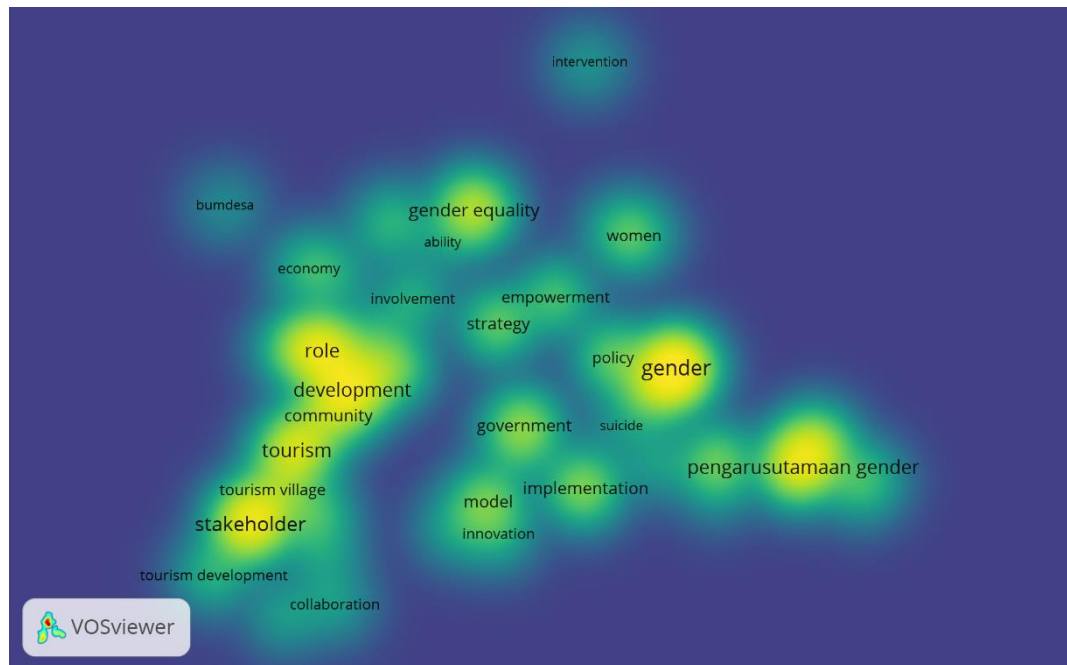
Penelitian yang dilakukan **Hibatulloh and Haryani (2023)** menganalisis tentang tingkat pemberdayaan perempuan pada program Desa PRIMA Summersari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data dianalisis menggunakan metode Miles & Hubberman. Teori yang digunakan adalah analisis gender milik Longwe terdiri dari lima level kesetaraan (*five levels of equality*) yang terdiri dari kesejahteraan (*welfare*), akses (*access*), kesadaran (*conscientisation*), partisipasi (*participation*), dan kontrol (*control*) (Longwe, 1991). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima level kesetaraan menurut Longwe sudah tercapai. Level kesejahteraan cenderung kuat tercapai. Anggota Desa PRIMA Summersari mampu meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memiliki dana pendidikan dari dana hasil usaha yang dikembangkan dengan Desa PRIMA Summersari. Level akses cenderung kuat tercapai. Anggota Desa PRIMA Summersari memiliki dan memanfaatkan akses sumber daya pendapatan dan pelatihan. Level kesadaran cenderung lemah tercapai karena belum semua anggota mendapat

penyuluhan terkait gender. Level partisipasi cenderung lemah tercapai. Anggota Desa PRIMA telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Desa PRIMA di berbagai tingkat, namun belum aktif dalam perumusan kebijakan di tingkat regional. Level kontrol cenderung kuat tercapai. Anggota Desa PRIMA Summersari telah memiliki kontrol atas faktor produksi dan pendapatan dari usaha milik mereka.

Penelitian dari **I. Noviani, Adnan, and Alfirdaus (2023)** menganalisis hambatan implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) di Jawa Tengah dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori hambatan ekonomi politik Rosendorff (2005) yang meliputi institusi, kepentingan, dan gagasan. Hasilnya mengungkapkan tiga jenis hambatan: struktural, institusional, dan kultural. Hambatan struktural mencakup keterbatasan kemampuan aparatur dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Hambatan institusional berkaitan dengan pemahaman yang keliru tentang konsep gender, sedangkan hambatan kultural dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat serta kurangnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat luas.

Setelah memetakan topik-topik penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di desa wisata melalui *network visualization*. Selanjutnya, pada bagian ini diidentifikasi tema yang dominan dalam riset terdahulu melalui *density visualization*. Dalam *density visualization* warna yang padat menunjukkan tema penelitian

yang dominan dari penelitian sebelumnya sesuai dengan topik penelitian pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di desa wisata.



Gambar 1.10 *Density visualization*
Sumber: Hasil analisis melalui *Vosviewer*, 2024

Pada gambar 1.10 dapat dilihat tema atau topik dominan yang sering dikaji dalam penelitian sebelumnya yaitu *gender*, *stakeholder*, *role*, *development* dan *pengarusutamaan gender*. Topik *gender* merupakan topik yang paling sering dibahas dalam penelitian dengan warna yang padat dari topik *gender*. Dalam beberapa artikel yang dikumpulkan, topik *gender* banyak dikaitkan dengan *policy* dan program. Adapun topik lain merupakan topik pendukung atau sejalan dengan tujuan pembahasan yang juga berposisi mendukung topik dominan yang sudah ada, begitupun sebaliknya. Kemudian, untuk topik yang tidak memiliki warna padat memberi peluang bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

Berdasarkan *research gap* tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan menggunakan perspektif gender, mengingat hingga saat ini masih sedikit penelitian yang mengangkat topik tersebut di lokasi ini. Dengan merujuk teori pengarusutamaan gender dari Longwe tentang pemberdayaan perempuan dan teori faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender. *State of the art* dari penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Wisata Nongkosawit dan teori pengarusutamaan gender menurut Longwe.

1.7.2 Landasan Teori

1.7.2.1 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Kamaruddin 2016) administrasi publik merupakan proses mengorganisir dan mengkoordinasikan yang dilakukan oleh sumber daya (*personal public*) untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu Henry (dalam Pasolong, 2016) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan sebuah perpaduan yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan untuk mengenalkan pemahaman dan informasi pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang dipimpin dan mendorong kebijakan publik yang dibuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Keban (2008) menambahkan bahwa kegiatan administrasi publik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (*public services*) masyarakat, maupun berkenaan dengan mengejar ketertinggalan masyarakat melalui program-program pembangunan. Adapun peran administrasi publik yaitu membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi (Keban, 2008).

Berdasarkan pendapat dari kedua pakar di atas administrasi publik adalah kegiatan yang menyangkut pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui program-program pembangunan untuk membantu memberdayakan masyarakat khususnya perempuan.

1.7.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Seiring berjalannya waktu paradigma administrasi publik sering mengalami pergeseran dimulai dari era “*administration dichotomy*” sampai dengan era “*governance*” hingga sampai akhirnya menciptakan konsep “*collaborative governance*”. Khun (dalam Pasolong 2016) menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau juga sebagai cara menemukan solusi suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Nicholas Henry (2004) sejak tahun 1975 paradigma administrasi publik beberapa kali direvisi yang awalnya menyatakan ada empat perkembangan paradigma menjadi enam perkembangan paradigma administrasi publik. Berikut ini merupakan pergeseran paradigma menurut Nicholas Henry (dalam Thoha, 2014) yakni:

1. *The Politics - Administration Dichotomy*, (1900 – 1926);

Dikotomi politik-administrasi memiliki dua fungsi utama pemerintah, yaitu: politik, yang mencakup pembuatan kebijakan dan aspirasi negara, serta administrasi, yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Paradigma ini menekankan pemisahan tegas antara politik dan administrasi, dengan perhatian pada posisi yang tepat bagi administrasi negara.

2. *The Principles of Administration*, (1927 – 1937);

Paradigma ini menekankan bahwa fokus lebih penting daripada lokasi. Prinsip administrasi negara berlaku di semua struktur administrasi tanpa memandang fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Salah satu prinsip terkenal dari Gullick dan Urwick adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*).

3. *Public Administration as Political Science*, (1950 – 1970);

Paradigma *public administration as political science* berfokus pada hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik, dengan penekanan pada birokrasi pemerintahan dan kepentingan publik. Paradigma ini menegaskan bahwa pelayanan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum, melibatkan warga negara, berpikir strategis, bertindak demokratis, serta memperhatikan norma, nilai, dan standar yang berlaku.

4. *Public Administration as Management, (1956 – 1970);*

Dalam paradigma ini, prinsip manajemen yang populer digunakan, dengan teknik dan spesialisasi yang memerlukan keahlian. Namun, tidak ditentukan secara spesifik dalam lembaga mana keahlian tersebut diterapkan. Fokus paradigma ini adalah pengembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi sosial dan kebijakan publik, yang diasumsikan dapat diterapkan di berbagai bidang, sehingga lokusnya menjadi kurang jelas.

5. *Public Administration as Public Administration, (1970 – sekarang);*

Paradigma *public administration as public administration* menegaskan bahwa administrasi publik adalah disiplin ilmu mandiri dengan teori, istilah, objek, dan metode unik. Fokusnya meliputi analisis kebijakan, praktik administrasi, teori organisasi, serta manajemen, sedangkan lokus normatifnya berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan isu-isu masyarakat.

6. *Governance, (1990 – sekarang).*

Paradigma *governance* melibatkan penerapan otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan masyarakat. Proses ini kompleks, melibatkan berbagai sektor yang berperan dalam pembuatan dan distribusi kebijakan publik, yang berdampak langsung pada masyarakat, lembaga, serta pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014). Dimulai pada tahun 1990-an, paradigma *governance* berkaitan erat dengan pemerintahan dan ditandai oleh perubahan persepsi dalam

administrasi dan pemerintahan, yang dapat diklasifikasikan dalam tiga aspek, antara lain:

a. Globalisasi.

Globalisasi melibatkan penggabungan perubahan multinasional internet, isu-isu lingkungan di seluruh dunia dan perdagangan internasional.

b. Redefinisi

Redefinisi adalah proses di mana pemerintah menata ulang perannya. Dalam proses ini, pemerintah tidak lagi berfokus pada kekuasaan dan hierarki, tetapi lebih mengutamakan kerja sama dan kemitraan.

c. Devolusi

Devolusi mencakup keterlibatan berbagai pihak, seperti warga negara, komunitas, kerja sama antara pemerintah dan swasta, organisasi nirlaba, perusahaan, lembaga pemerintah, serta asosiasi pemerintahan lainnya.

Selama paradigma *governance*, administrasi publik bergerak dari kontrol terhadap warga menjadi upaya untuk menyediakan kebijakan publik, hukum, serta organisasi dan lembaga yang dikelola oleh warga. Perbedaan kelembagaan antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan sektor nirlaba semakin kabur, sementara organisasi diubah dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Utomo (2008: 184), dalam sistem pemerintahan yang mengedepankan konsep *governance*, diperlukan adanya sinergi antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah (*public*), masyarakat (*community*) atau *civil society* (masyarakat madani), dan sektor swasta (*private*). Utomo (2008: 185) juga menambahkan bahwa ketiga aktor tersebut harus menempatkan diri sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan negara dan masyarakat.

Berdasarkan paradigma di atas penelitian ini termasuk ke dalam paradigma keenam yaitu *governance* artinya pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mengelola tata pemerintahan termasuk dalam memberikan pelayanan publik melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan. Dalam penelitian ini, pemerintah bekerja sama dengan akademisi, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata melalui program desa wisata yang berbasis pengarusutamaan gender dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan dalam sektor pariwisata dan meningkatkan peran serta mereka dalam perekonomian lokal.

1.7.2.3 Manajemen Publik

Ott, Hyde & Shafritz, 1990 (dalam Keban, 2008) berpendapat bahwa manajemen publik adalah bagian dari administrasi publik yang berfokus pada perancangan program, restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya

melalui anggaran dan manajemen keuangan, serta manajemen sumber daya manusia, evaluasi program, dan audit. Manajemen publik juga berkaitan dengan pengaturan aktivitas internal organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan organisasi, serta memiliki tingkat fleksibilitas tinggi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi operasionalnya.

Paradigma manajemen terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Awalnya, konsep yang digunakan adalah *Old Public Administration* (OPA). Kemudian, berkembang menjadi *New Public Management* (NPM), lalu beralih ke konsep government, dan akhirnya mengarah pada paradigma governance. Adanya pergeseran paradigma menyebabkan lahirnya istilah baru yaitu kolaborasi antar *stakeholders*. Selain pemerintah kolaborasi ini melibatkan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat atau *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang ada di publik (Tilano and Suwitri 2019).

Dalam konteks *governance* sebagai jaringan (*networks*) terkait kemitraan, Bovaird and Loeffler (2015) menjelaskan bahwa *governance* memiliki beberapa makna. Pertama, interaksi antar stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan. Kedua, struktur sosial-politik yang terbentuk dari interaksi semua aktor. Ketiga, koordinasi formal dan informal antara sektor publik dan *privat*. Keempat, konsep yang mencerminkan koordinasi sistem sosial dengan peran negara. Mereka juga menekankan bahwa elemen penting dalam governance muncul ketika masalah kolektif tidak

dapat diselesaikan hanya oleh otoritas publik, sehingga memerlukan kerja sama antara berbagai stakeholder seperti masyarakat, bisnis, dan LSM melalui mediasi, arbitrase, dan *self-regulation* yang lebih efektif dibandingkan intervensi langsung pemerintah.

Berdasarkan pendapat dari pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengatur berbagai aktivitas organisasi untuk memenuhi kepentingan publik dan mengatasi permasalahan yang ada. Kegiatan ini meliputi perencanaan program, restrukturisasi organisasi, serta evaluasi program. Dalam penelitian ini, manajemen publik diterapkan untuk mengelola aktivitas pengembangan pariwisata melalui pembuatan program desa wisata yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian lokal.

1.7.2.4 Pengembangan Pariwisata

Menurut Pebriyanti (2020) (dalam Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman 2022) pengembangan pariwisata merupakan tahapan dalam langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan seta tujuan pembangunan. Paturusi (2001) menyatakan bahwa pengembangan adalah strategi yang dilakukan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi suatu objek serta daya tarik wisata, agar dapat dikunjungi oleh wisatawan dan memberikan manfaat baik bagi masyarakat sekitar objek wisata maupun pemerintah. Sementara itu, Gamal

Suwantoro (2004) menghubungkan pengembangan pariwisata dengan sapta pengembangan kebijakan pemerintah, yang meliputi promosi, aksesibilitas, kawasan pariwisata, wisata bahari, produk wisata, sumber daya manusia, dan kampanye nasional sadar wisata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pariwisata. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan potensi Desa Wisata Nongkosawit, yang meliputi aspek sumber daya manusia, produk wisata, promosi, dan kampanye sadar wisata..

Pengembangan pariwisata, menurut Oka A. Yoeti (2008), adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kualitas produk wisata yang sudah ada atau menambahkan jenis produk baru yang dapat dipasarkan. Sementara itu, menurut Soetomo (dalam Suwanti 2017), pengembangan pariwisata merupakan proses yang terus berkembang dan berorientasi ke masa depan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam industri pariwisata. Lebih lanjut Yoeti (2008) menyebutkan bahwa untuk menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata, maka perlu memperhatikan lima aspek sebagai berikut:

- a. *Traveler* (turis)
- b. *Transportation* (transport)
- c. *Attraction* (Atraksi)
- d. Fasilitas Pelayanan
- e. Informasi dan promosi

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka pengembangan pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek atau daya tarik wisata yang memberi memberikan manfaat bagi masyarakat lokal maupun bagi sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata memiliki hubungan yang erat dengan administrasi publik, karena pelaksanaannya sering kali melibatkan pemerintah daerah, lembaga-lembaga terkait, serta masyarakat setempat. Administrasi publik berperan dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, serta memastikan keberlanjutan program pariwisata yang dilakukan, agar dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antara sektor publik dan masyarakat.

Selain itu, pentingnya gender dalam pengembangan pariwisata juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam banyak kasus, perempuan sering kali menjadi aktor yang terlupakan dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, pengintegrasian perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pariwisata sangat penting untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi perempuan, sekaligus memberdayakan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dalam penelitian ini, pengembangan pariwisata melalui program desa wisata digunakan sebagai salah satu strategi untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan

perekonomian lokal. Program ini bertujuan menciptakan peluang ekonomi bagi perempuan dalam sektor pariwisata, seperti pembuatan produk lokal, penyediaan jasa, dan partisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Fokus pengembangan pariwisata tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan sosial, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan, dalam pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

1.7.2.5 Gender

Gender biasanya didefinisikan dengan seks yaitu klasifikasi perempuan dan laki-laki. Namun, definisi seks dan gender sebenarnya berbeda. Seks adalah pembagian biologis dari dua jenis kelamin. Seringkali dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan, perbedaan ini ada di alam, permanen, tidak dapat dipertukarkan antara kodrat laki-laki dan perempuan, dan permanen. Gender adalah pembagian sifat keberadaan manusia yang ditentukan oleh sosial dan budaya (D. Noviani, Muyasaroh, and Mustafiyanti 2022). Betina dan jantan memiliki karakteristik ini. Fitrah manusia dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki sifat yang sama dengan laki-laki, seperti kesabaran dan kelembutan, dan laki-laki memiliki sifat yang sama dengan laki-laki, tetapi kebalikannya. Hal ini sesuai dengan gagasan Mansour Fakih (1996) bahwa jenis kelamin, atau perbedaan jenis kelamin, merupakan perbedaan biologis, sedangkan gender adalah perbedaan perilaku yang dikonstruksi secara sosial antara laki-laki dan perempuan.

Gender adalah perbedaan yang dibuat oleh manusia (laki-laki maupun perempuan) melalui proses sosial dan budaya yang lama.

Gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi serta faktor non biologis lainnya. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat (Alfian, 2016). Menurut perspektif gender indikator kemajuan dan kesejahteraan manusia adalah sama, tidak dibedakan dan diskriminasi (Abdullah, 2016). Ini berarti bahwa peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di daerah tertentu mungkin tidak sama dengan fungsi dan tanggung jawab di daerah lain.

Dalam pemberdayaan masyarakat harus melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya. Hal ini, dikarenakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, perencanaan sosial sangat penting karena aktivitas yang dilakukan tidak bersifat tunggal melainkan kolektif, yang berarti bahwa perumus program, pelaksana, dan penerima pelayanan dalam setiap program harus bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Namun demikian, norma gender sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki, yaitu budaya yang menganggap laki-laki lebih penting daripada perempuan

(Siscawati, 2015). Akibatnya, penerima manfaat pemberdayaan tidak setara antara gender.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah konsep sosial dan budaya yang mengacu pada peran, perilaku, dan atribut yang masyarakat kaitkan dengan laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan historis.

1.7.2.6 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah sebuah strategi yang dirancang untuk menggabungkan perspektif gender sebagai bagian integral dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan (Ayissa Tazkia, Listyaningsih, and Juliannes Cadith 2022). Menurut Bappenas (2012), strategi pembangunan yang responsif gender mempertimbangkan aspek seperti akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi.

Pengarusutamaan gender juga merupakan pendekatan strategis untuk memasukkan aspek gender ke dalam semua tahapan kebijakan dan program pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi. Selain itu, pengarusutamaan gender bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan maupun laki-laki dalam semua aktivitas kehidupan (Fibrianto 2018). Sementara itu, menurut Razavi dan Miller (2006), pengarusutamaan gender melibatkan proses yang

bersifat teknis dan politik, yang memerlukan perubahan dalam aspek budaya organisasi, tujuan, struktur, serta alokasi sumber daya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG). KKG dapat dicapai melalui kebijakan dan program yang secara sistematis memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi semua kebijakan dan program di berbagai sektor kehidupan dan pembangunan (Wiasti 2017).

Baik pemerintah daerah maupun sektor swasta memberikan peluang yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk menjalankan tugas, fungsi, hak, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fokus perhatian kepada perempuan sebagai sasaran mencakup perempuan yang sudah menikah dan masih dalam usia reproduktif, perempuan yang sedang menyusui, serta perempuan yang memiliki anak usia balita.

Sementara itu, sasaran utama dari Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah lembaga pemerintah yang menjalankan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, program, kegiatan, dan perencanaan. Selain itu, sasaran PUG juga mencakup organisasi profesi, organisasi swasta, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan keluarga.

Kementerian Keuangan menetapkan tujuh prasyarat dalam implementasi pengarusutamaan gender, antara lain::

1) Komitmen Politik Kepemimpinan Kelembagaan

Pemimpin harus menunjukkan komitmen dalam memprioritaskan isu gender di organisasi yang dipimpinnya. Ini menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan PUG secara efektif.

2) Kebijakan Responsif Gender

Komitmen pemimpin harus terlihat dalam kebijakan yang dibuat sesuai tugas dan fungsi instansi, seperti kebijakan penyediaan sarana-prasarana, kegiatan komunikasi, edukasi, dan informasi tentang PUG, serta kebijakan lainnya.

3) Kelembagaan

Struktur dan mekanisme kelembagaan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan PUG untuk mencapai tujuan yang sama secara efektif.

4) Sumber Daya

Sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan analisis gender menjadi penggerak utama PUG. Selain itu, dukungan anggaran juga diperlukan untuk implementasi PUG dalam kebijakan, layanan, sarana-prasarana, dan kegiatan.

5) Data Terpilah

Pengumpulan data yang dibagi berdasarkan jenis kelamin dapat membantu memahami peran, status, kondisi, dan kebutuhan perempuan serta laki-laki. Data ini penting untuk menganalisis isu gender yang ada.

6) Alat Analisis

Analisis gender adalah proses untuk mengidentifikasi isu gender berdasarkan perbedaan peran dan status, yang kemudian menciptakan ketimpangan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki.

7) Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan PUG melibatkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, seperti pakar gender, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghapus kesenjangan gender demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam proses pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam hal pertanggungjawaban atas hasil kerja. Oleh karena itu, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender (KG) dan bukan tujuan itu sendiri (Martiany 2011).



Gambar 1.11 PUG Sebagai Strategi Pencapaian KG

Sumber: (Martiany 2011)

Kesetaraan Gender dapat dicapai dengan mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kontrol, partisipasi, serta mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. Untuk mewujudkan hal

ini, diperlukan analisis gender yang menjadi dasar dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif terhadap perspektif gender.

Menurut Sugarda (Esariti, Fauziah, and Artiningsih 2020), ada empat aspek gender yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan, antara lain:

a. Akses

Akses mencakup peluang atau kesempatan untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya. Apakah perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan akses yang adil untuk perempuan dan laki-laki.

b. Peran/Partisipasi

Partisipasi berkaitan dengan keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup sejauh mana aspirasi, pengalaman, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi juga dapat berupa kegiatan di lingkungan sosial dan masyarakat, seperti aktivitas lembaga masyarakat.

1) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pada dasarnya, pembangunan adalah upaya untuk memperbaiki kondisi saat ini. Akibatnya, pembangunan harus dirancang secara egaliter dan memberikan manfaat yang sama kepada semua, terlepas dari ras, suku, agama, kelompok sosial, dan kelompok ekonomi,

serta melibatkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan.

Menurut Davis dan Newstorm (1993), partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang dalam konteks kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan memikul berbagai tanggung jawab untuk mencapainya. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan keterlibatan warga komunitas dalam lingkungannya.

Oakley dalam (Ife dan Tesoriero 2014). partisipasi dapat dibedakan menjadi dua jenis: sebagai alat dan sebagai tujuan.

- a. Partisipasi sebagai alat berarti keterlibatan masyarakat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti fisik, ekonomi, dan sosial. Fokusnya adalah pada hasil yang dicapai.
- b. Partisipasi sebagai tujuan lebih menekankan pada proses pengembangan kemampuan masyarakat agar mereka bisa berperan aktif dalam pembangunan. Dalam hal ini, partisipasi dianggap sebagai tindakan yang aktif dan dinamis, di mana masyarakat benar-benar terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Selain itu, Oakley dalam (Ife dan Tesoriero 2014) membagi partisipasi dalam konteks pembangunan menjadi empat pernyataan:

- a) Sumbangan sukarela individu atau program publik yang mendukung pembangunan nasional Orang-orang yang terlibat meskipun program tersebut tidak ada.
- b) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berarti warga turut serta dalam berbagai tahap, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program pembangunan.
- c) Usaha yang terorganisir untuk meningkatkan pengawasan sumber daya dan lembaga pemerintah.
- d) Proses aktif dari kelompok tertentu yang diuntungkan yang mempengaruhi arah dan pelaksanaan program pembangunan. Pendapatan, kemajuan pribadi, swadaya, dan nilai-nilai lainnya dianggap dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

2) Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat secara keseluruhan, karena perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat. Menurut Taliziduhu partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola, merawat, dan memanfaatkan berbagai sumber daya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

- b) Membangun ketahanan masyarakat agar mampu bangkit dari keterpurukan atau kemunduran akibat kesalahan di masa lalu.
- c) Mengembangkan serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang sudah ada.
- d) Mendorong masyarakat agar dapat merespons perubahan yang terjadi dengan sikap yang positif.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

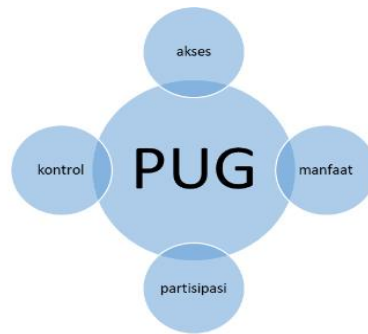
- a) Adanya kontak dengan pihak lain, yang menjadi langkah awal dalam mendorong perubahan sosial.
- b) Menerima, menanggapi, atau bahkan menolak informasi yang diperoleh sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan.
- c) Terlibat dalam perencanaan pembangunan serta ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

c. Kontrol

Ini berkaitan dengan penguasaan atau wewenang untuk membuat keputusan. Kebijakan pembangunan harus memberikan kontrol yang setara terhadap sumber daya seperti informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya kepada perempuan dan laki-laki.

d. Manfaat

Manfaat berarti kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal. Proses perencanaan pembangunan harus dirancang agar memberikan manfaat bagi baik perempuan maupun laki-laki.



Gambar 1.12 Model Pengarusutamaan Gender

Sumber: (Arieta et al. 2022)

1.7.2.7 Analisis Gender

Terdapat berbagai macam metode dalam analisis gender yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks dan relevansinya. Menurut CIDA (Canadian International Development Agency), analisis gender merupakan sekumpulan teknik yang digunakan untuk memahami dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk akses mereka terhadap sumber daya, aktivitas, serta tantangan yang dihadapi oleh keduanya. Analisis gender menjadi salah satu elemen penting dalam analisis sosial-ekonomi. Ketika diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek program dan kegiatan pembangunan, analisis gender dapat memberikan manfaat yang signifikan. Salah satu tantangan dalam implementasi PUG (Pengarusutamaan Gender) ke depan adalah memastikan bahwa analisis gender menjadi bagian integral dari analisis sosial dalam program dan kegiatan pembangunan yang lebih luas, selaras dengan analisis terkait keberlanjutan dan pengentasan kemiskinan (Hunt, 2004).

Menurut Moser (1993), analisis gender atau diagnosis gender bertujuan untuk mengungkap implikasi khusus dan masalah-masalah spesifik dalam

pembangunan yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki, serta hubungan di antara keduanya (relasi gender). Teori ini menegaskan bahwa analisis gender sebaiknya dilakukan sebelum merancang rencana dan program pembangunan. Selain itu, analisis gender juga berfokus pada penelusuran faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan akses, partisipasi, dan pengendalian antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan, serta mengevaluasi manfaat pembangunan bagi keduanya. Selain itu terdapat berbagai jenis model kerangka yang sering digunakan dalam melakukan Analisis Gender, yaitu:

1. Kerangka Analisis Harvard (*Harvard Analytical Framework*);

Analisis gender dalam kerangka Harvard mengevaluasi perbedaan aktivitas antara perempuan dan laki-laki, perbedaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh keduanya, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut. Biasanya, kerangka ini disajikan dalam bentuk matriks, yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data pada tingkat mikro, seperti komunitas dan rumah tangga.

Tabel 1.4 Empat Komponen Utama Analisis Gender Model *Harvard*

Empat Komponen Utama Analisis Gender Model <i>Harvard</i>
1. Tool 1: Profil Aktivitas
2. Tool 2: Profil Akses dan Kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat
3. Tool 3: Faktor yang berpengaruh terhadap akses dan kontrol
4. Tool 4: Checklist analisis siklus proyek

Sumber: (March, Smyth, and Mukhopadhyay 2005) (Nurhaeni 2022).

2. Kerangka Kerja Moser (*Mosser's Framework*);

Model Analisis Gender Moser dikembangkan oleh Caroline Moser di Development Planning Unit (DPU), University of London, Inggris, pada awal 1980-an. Model ini berfokus pada tiga aspek utama: (1) mengidentifikasi tiga peran perempuan, yaitu peran produktif (terkait pekerjaan dan penghasilan), peran reproduktif (mengurus keluarga dan rumah tangga), serta peran sosial (partisipasi dalam komunitas); (2) membedakan dua jenis kebutuhan gender, yaitu kebutuhan praktis (seperti akses terhadap layanan dasar) dan kebutuhan strategis (seperti kesetaraan hak dan kebijakan yang mendukung perempuan); (3) menjelaskan dua pendekatan kebijakan *Women in Development* (WID) yang berfokus pada peran perempuan dalam pembangunan, serta *Gender and Development* (GAD) yang berfokus pada kesetaraan gender secara lebih luas.

Tabel 1.5 Empat Komponen Utama Analisis Gender Model Moser

Empat Komponen Utama Analisis Gender Model Moser
1. Tool 1: Identifikasi peran gender (<i>triple role</i>)
2. Tool 2: Penilaian Kebutuhan Gender
3. Tool 3: Pemisahan kontrol sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga
4. Tool 4: Perencanaan terkait menyeimbangan peran gender (<i>triple role</i>)
5. Tool 5: Menganalisis tujuan kebijakan, menggunakan matriks kebijakan WID/GAD
6. Tool 6: Melibatkan perempuan, dan organisasi serta perencana yang sadar gender dalam perencanaan

Sumber: (March, Smyth, and Mukhopadhyay 2005) (Nurhaeni 2022)

3. Matriks Analisis Gender (*Gender Analysis Matrix*);

Analisis gender model GAM dibuat oleh Rani Parker pada tahun 1993. Model ini dirancang untuk memberikan kerangka analisis gender yang relevan dengan kondisi di tingkat akar rumput. Tujuan dari GAM adalah untuk memahami perbedaan pengaruh intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki melalui metode analisis berbasis komunitas. GAM berfungsi sebagai alat transformasi yang digunakan langsung oleh anggota masyarakat.

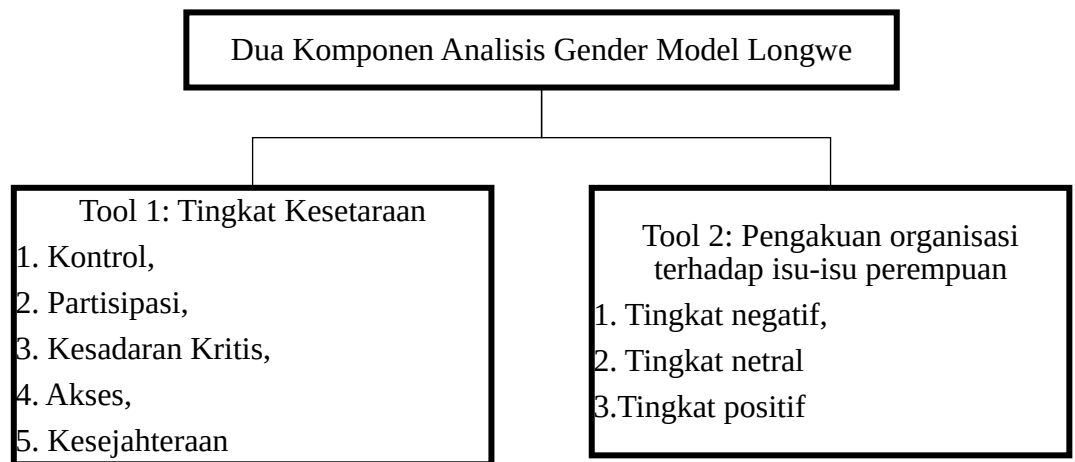
Tabel 1.6 Empat Komponen Utama Analisis Gender Model GAM

Empat Komponen Utama Analisis Gender Model GAM
1. Tool 1: Analisis pada empat tingkat masyarakat
2. Tool 2: Analisis empat jenis dampak

Sumber: (March, Smyth, and Mukhopadhyay 2005) (Nurhaeni 2022)

4. Kerangka Pemberdayaan Perempuan Longwe (*Women Empowerment Framework*);

Kerangka pemberdayaan perempuan (teknik analisis gender pemberdayaan perempuan) adalah metode analisis yang pertama kali dikembangkan oleh Sara Hlupekile Longwe. Model analisis gender Sara Longwe dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kesetaraan gender dicapai dalam proyek pembangunan serta menilai komitmen organisasi terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Teknik ini memiliki dua elemen utama: pertama, aspek tingkat kesetaraan yang mencakup kontrol, partisipasi, kesadaran, akses, dan kesejahteraan; kedua, pengakuan organisasi terhadap isu-isu perempuan yang dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat negatif, tingkat netral, dan tingkat positif.



Gambar 1.13 Dua Komponen Analisis Gender Model Longwe
Sumber: (March, Smyth, and Mukhopadhyay 2005) (Nurhaeni 2022)

Analisis gender menggunakan metode Longwe digunakan sebagai alat analisis proses pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk memahami lima butir kriteria analisis yaitu: kesejahteraan, akses, penyadaran, partisipasi aktif dan penguasaan.

a. Dimensi kesejahteraan

Dimensi kesejahteraan mencakup aspek kesejahteraan material yang ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang seharusnya dapat dinikmati oleh baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, kesenjangan gender dalam dimensi kesejahteraan dapat dilihat melalui perbedaan tingkat kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, yang mencakup masing-masing kebutuhan dasar tersebut. Contohnya, perbedaan dapat terlihat dalam aspek penghasilan, tingkat kematian, atau status gizi.

b. Dimensi akses

Dimensi akses melihat sejauh mana laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap sumber daya dapat digunakan untuk menilai ada atau tidaknya kesenjangan gender. Tingkat ini menggambarkan kondisi di mana pemberdayaan perempuan masih minim (*Zero level of women's empowerment*). Padahal, untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, diperlukan partisipasi aktif perempuan dalam proses pemberdayaan dan pada tingkat pemerataan yang lebih tinggi.

c. Dimensi Kesadaran Kritis

Dimensi kesadaran kritis berkaitan dengan proses menyadari ketidaksetaraan gender yang muncul dari pandangan yang memposisikan perempuan secara sosial dan ekonomi di bawah laki-laki, serta pembagian kerja tradisional yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Pemberdayaan pada tingkat ini bertujuan untuk mendorong sikap kritis dan penolakan terhadap pandangan tersebut, dengan menegaskan bahwa subordinasi perempuan bukanlah hal yang alami, tetapi merupakan bentuk diskriminasi yang lahir dari struktur sosial yang ada. Kesadaran akan kesetaraan gender sebagai tujuan perubahan sosial menjadi elemen inti dalam kesadaran gender dan berperan sebagai aspek ideologis dalam proses pemberdayaan.

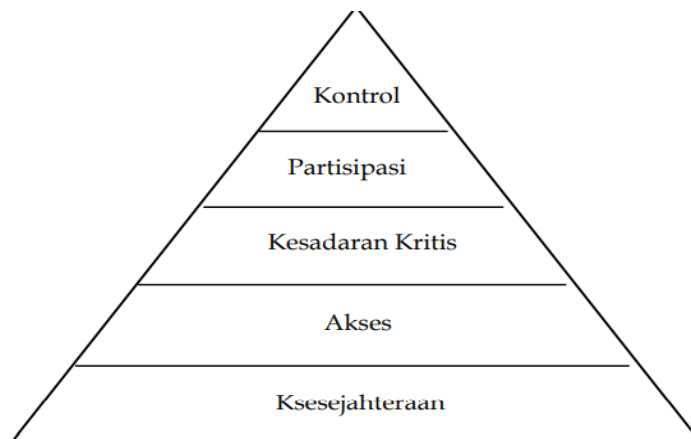
d. Dimensi partisipasi

Dimensi partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan, yang mencakup perencanaan, penentuan kebijakan, administrasi, pemantauan dan evaluasi. Secara umum, partisipasi menggambarkan adanya peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara. Dalam konteks program, partisipasi ini berarti melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, mengelola, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Peningkatan peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan yang juga memberikan kontribusi penting terhadap pemberdayaan secara keseluruhan.

e. Dimensi kuasa/kontrol

Dimensi kontrol merujuk pada salah satu aspek dalam pengukuran kesetaraan gender yang fokus pada pembagian kekuasaan dan kontrol atas sumber daya antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender pada dimensi ini terlihat dari adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam rumah tangga, komunitas, maupun dalam skala yang lebih luas. Kesetaraan dalam hal kekuasaan berarti adanya distribusi kekuasaan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, di mana tidak ada pihak yang mendominasi atau berada dalam posisi yang

lebih unggul dibandingkan yang lain. Dengan demikian, perempuan memiliki kekuasaan yang setara dengan laki-laki, yang memungkinkan mereka untuk mengubah posisi mereka, masa depan pribadi, serta kondisi komunitas mereka.



Gambar 1.14 Piramida Longwe
Sumber: (Handayani, 2002: 183)

Penjelasan mengenai gambar 1.14 di atas menunjukkan bahwa pergerakan ke atas berkaitan dengan peningkatan dampak proyek terhadap pemberdayaan. Semakin tinggi tingkat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, semakin besar tingkat pemberdayaan yang tercapai maka semakin tinggi tingkat pembangunan. Lima tingkatan kesetaraan digambarkan sebagai "Kriteria Pengembangan Perempuan," yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Kriteria tersebut meliputi kesejahteraan, partisipasi, kontrol, kesadaran kritis, dan akses. Dalam penelitian ini, kelima dimensi analisis tersebut dinilai secara khusus berdasarkan pengalaman atau persepsi perempuan, dengan fokus

pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang sedang dilaksanakan.

Selanjutnya, untuk alat kedua, yaitu pengakuan organisasi terhadap isu-isu perempuan, analis menilai sejauh mana tujuan proyek memperhatikan atau justru mengabaikan isu perempuan. Longwe dalam (March, Smyth, and Mukhopadhyay 2005) menegaskan bahwa penting untuk tidak hanya menilai tingkat pemberdayaan perempuan yang ingin dicapai melalui suatu program, tetapi juga memahami sejauh mana tujuan program tersebut berkaitan dengan isu perempuan. Dengan begitu, dapat diketahui apakah masalah perempuan diakui, ditangani, atau diabaikan.

Longwe dalam (March, Smyth, and Mukhopadhyay 2005) menggunakan definisi spesifik tentang 'isu-isu perempuan', yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kesetaraan perempuan dalam peran sosial dan ekonomi. Ini melibatkan berbagai aspek, seperti kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. Dalam mengevaluasi pengakuan organisasi terhadap isu perempuan dalam desain proyek, Longwe mengidentifikasi tiga tingkat pengakuan yang berbeda: tingkat negatif, tingkat netral (konservatif), dan tingkat positif. Yang perlu ditekankan adalah bahwa isu perempuan yang dibahas oleh Longwe berkaitan dengan aspek gender.

Tabel 1.7 Tingkat Pengakuan Isu Perempuan

Tingkat Pengakuan	Keterangan
Tingkat negatif	Pada tingkat ini, tujuan proyek tidak menyebutkan masalah perempuan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perempuan seringkali tidak mendapat perhatian dan dibiarkan kondisinya lebih buruk oleh proyek.
Tingkat netral (level konservatif)	Pada tingkat ini proyek mengakui masalah perempuan, tetapi intervensi proyek tidak membuat kondisi perempuan lebih buruk daripada kondisi sebelumnya.
Tingkat positif	Pada tingkat ini, tujuan proyek secara positif berkaitan dengan isu-isu perempuan, yaitu meningkatkan posisi perempuan relatif terhadap laki-laki

Sumber: (March, Smyth, and Mukhopadhyay 2005)

5. Kerangka Kerja Pendekatan Relasi Sosial (*Social Relation Approach*).

Tujuan analisis gender dalam model SRA adalah untuk merancang kebijakan dan program yang memungkinkan perempuan berperan aktif sebagai agen pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari proses pembangunan.

Tabel 1.8 Empat Komponen Utama Analisis Gender Model SRA

Empat Komponen Utama Analisis Gender Model SRA
1. Tool 1: Pembangunan sebagai peningkatan kesejahteraan manusia
2. Tool 2: Hubungan sosial
3. Tool 3: Analisis kelembagaan
4. Tool 4: Kebijakan gender kelembagaan
5. Tool 5: Penyebab langsung mendasar dan struktural

Sumber: (March, Smyth, and Mukhopadhyay 2005) (Nurhaeni 2022)

Dalam konteks implementasi Pembangunan Berbasis Usulan Gender (PUG) di Indonesia, terdapat dua pendekatan yang sering diterapkan, yaitu:

1. Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang pengarusutamaan gender, metode ini digunakan untuk

menganalisis aspek gender dalam empat dimensi: akses, peran, kontrol, dan manfaat.

2. Pendekatan *Problem Based Analysis* (Proba) yang dikembangkan melalui kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan UNFPA

Dalam analisis gender saat ini, fokus para pakar gender dan pembangunan lebih pada relasi gender, bukan hanya pada perempuan secara individu. Hal ini berarti bahwa objek analisis tidak hanya perempuan, tetapi juga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jika analisis hanya memusatkan perhatian pada perempuan, maka analisis tersebut cenderung memisahkan perempuan dari aspek kehidupan yang lebih luas serta hubungan sosial yang mendasari ketidakadilan gender (Kabeer 2005). Akibatnya, ketidakadilan yang dialami perempuan sering kali dianggap sebagai kesalahan individu perempuan itu sendiri, bukan sebagai hasil dari struktur relasi gender yang tidak setara. Kabeer (2005) mengemukakan bahwa ketidakadilan gender muncul dari hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Akibat relasi ini, perempuan sering kali mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender, seperti subordinasi, diskriminasi, kekerasan, dan stereotip.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis gender untuk menganalisis pemberdayaan perempuan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit dengan menggunakan teori analisis gender dari Longwe. Teori ini mencakup lima dimensi, yaitu dimensi kesejahteraan,

dimensi akses, dimensi penyadaran, dimensi partisipasi, dan dimensi kontrol serta level isu pengakuan perempuan yaitu positif, netral dan negatif.

1.7.2.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan pariwisata

berbasis Pengarusutamaan Gender

Berbagai sumber penelitian sebelumnya memberikan dasar dan mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan pengarusutamaan gender ini. Menurut Cavaghan (2013:417), hal-hal seperti kebutaan terhadap konsep gender, ketidakpahaman tentang gender, dan pernyataan yang menganggap masalah gender tidak penting atau tidak relevan menjadi hambatan untuk menerapkan pengarusutamaan gender. Akibatnya, pengarusutamaan gender menjadi tidak efektif dalam penerapannya. Pendekatan ekonomi politik yang diusulkan oleh Rosendorff dapat digunakan untuk melihat tantangan pengarusutamaan gender (I. Noviani, Adnan, and Alfirdaus 2022), yang terdiri dari:

1. Hambatan *Institusional* (institusi)

Institusi mencakup berbagai lembaga dan sistem yang berhubungan dengan proses politik dan kebijakan, seperti pemilihan umum, partai politik, parlemen, serta kerangka kebijakan mengenai desentralisasi dan aspek politik informal. Hambatan ini juga berkaitan dengan peluang dan tantangan dalam merumuskan dan menegosiasikan kebijakan serta program perlindungan sosial.

2. Hambatan Struktural (Kepentingan),

Kepentingan adalah pertimbangan dari para pemangku kepentingan utama yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, baik dalam aspek kemenangan atau kerugian. Ini melibatkan elemen seperti elit politik, pemimpin birokrasi, donor, dan tokoh masyarakat. Hambatan ini juga mencakup dinamika keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah, misalnya ketimpangan pengaruh antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial.

3. Hambatan Kultural (Gagasan)

Hambatan ini berkaitan dengan pandangan dan pemahaman yang dimiliki oleh elit politik dan masyarakat mengenai isu-isu seperti kemiskinan, kerentanan, kesetaraan, serta penyebab masalah tersebut. Ini juga mencakup pandangan tentang kontrak sosial antara negara dan rakyat, serta bentuk dukungan negara yang dianggap tepat. Dalam hal ini, konsep seperti hak orang miskin, kesadaran akan ketergantungan, dan pandangan negatif terhadap ketimpangan memainkan peran penting.

Selanjutnya, analisis faktor pendukung dan pengambat dalam pengembangan pariwisata menurut Purwanto dan Sulistyastuti (dalam Yuningsih, T, 2018) adalah:

1. Nilai

Nilai adalah peran dan ambisi *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Wart dalam (Suwitri 2008) membagi lima (5)

sumber sistem nilai yang mempengaruhi intensitas dan dominasi hubungan diantara *stakeholder* yakni:

a. Nilai individu

Nilai individu adalah suatu hal yang dijadikan pedoman *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Nilai profesional

Nilai profesional berkaitan dengan prinsip etika yang menjadi dasar dalam praktik serta panduan dalam pengambilan keputusan.

c. Nilai organisasi

Dalam pengembangan pariwisata, nilai organisasi dipengaruhi oleh struktur organisasi, budaya kerja, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan.

d. Nilai legal

Nilai legal tercermin dalam konstitusi negara. Jika konstitusi mengalami perubahan, maka kebijakan yang berlaku juga dapat ikut berubah.

e. Nilai kepentingan publik

Nilai kepentingan publik mengacu pada aspek yang diperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam menjalin kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata (Destiana et al., 2020). Komunikasi dapat dilihat dari seberapa sering

antar aktor saling berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi baik secara lisan maupun tertulis untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Sutardji dalam (Sutarjo, Yuliastanty, and Arivin 2022) ada beberapa indikator komunikasi efektif, yaitu:

a. Pemahaman

Kemampuan seseorang untuk menangkap pesan dengan jelas dari lawan bicara.

b. Kesenangan

Komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menciptakan suasana yang menyenangkan bagi kedua belah pihak.

c. Pengaruh pada sikap

Komunikasi yang baik dapat mengubah sikap atau pandangan penerima pesan.

d. Hubungan yang makin baik

Komunikasi yang efektif bisa mempererat hubungan antar individu.

e. Tindakan

Komunikasi dianggap berhasil jika setelahnya ada tindakan nyata yang dilakukan oleh kedua pihak.

3. Kepercayaan,

Kepercayaan dilihat dari kepercayaan dari masing-masing aktor untuk menjalin kerjasama dengan aktor lain untuk mencapai tujuan bersama.

Maharani membagi kepercayaan menjadi 4 aspek yaitu:

a. Kehandalan

Kehandalan adalah suatu bentuk konsistensi dari kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata

b. Kejujuran

Dalam pengembangan pariwisata *stakeholder* saling memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

c. Kepedulian

Bentuk kepedulian dalam pengembangan pariwisata antar *stakeholder* yaitu saling memberikan performa kerja sama, pengertian dan pelayanan yang baik.

d. Kredibilitas

Kredibilitas adalah kualitas kolaborasi antar *stakeholder* dalam mengembangkan pariwisata.

4. Sumber kebijakan

Sumber kebijakan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan yang ada dalam mewadahi hubungan antar *stakeholder* atau jaringan yang terbentuk dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengadopsi faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata dari Tri Yuniningsih. Teori ini dipilih karena dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan pariwisata, yang dapat dihubungkan dengan pengarusutamaan gender.

1.7.2.9 Faktor yang Mempengaruhi Pengarusutamaan Gender

Dalam penelitiannya Licuanan menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi peran gender baik perempuan maupun laki-laki di dalam masyarakat yang lebih luas (Suradisastra, dalam Hastuti 2015). Berikut beberapa faktor yang menghambat, yaitu:

1. Status Sosial

Status sosial gender berkaitan dengan proses pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, berdampak pada tingkat produktivitas mereka.

2. Hambatan Memperoleh Pekerjaan

Adanya peluang gender dalam memperoleh pekerjaan yang sering dipengaruhi oleh norma tradisional. Secara umum, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan cenderung dikaitkan dengan tugas-tugas rumah tangga.

3. Status Pekerjaan

Terdapat perbedaan posisi dan imbalan berdasarkan gender, di mana perempuan umumnya menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun pekerjaan yang dilakukan sama.

4. Beban Ganda

Perempuan memiliki tanggung jawab ganda yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Mereka menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam menyeimbangkan peran sebagai anggota keluarga dan tanggung jawab pekerjaan

1.7.2.10 Desa Wisata

Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri atas penduduk pada suatu wilayah yang memiliki kesadaran untuk berperan bersama sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing guna memberdayakan potensi yang ada di wilayahnya. Kemudian menurut Nuryanti (dalam Yuliati and Suwandono 2016) desa wisata adalah konsep pariwisata yang menggabungkan atraksi, tempat menginap, dan fasilitas pendukung dalam kehidupan masyarakat setempat yang masih mempertahankan adat dan tradisi yang berlaku. Sementara itu, Joshi (2012) mendefinisikan desa wisata sebagai bentuk pariwisata pedesaan yang menawarkan pengalaman khas berupa keindahan alam, budaya lokal, serta unsur unik lainnya yang dapat menarik wisatawan.

Widi Kurniawan (dalam Kadek et al. 2017) mengatakan bahwa pengembangan desa wisata merupakan suatu bentuk pariwisata dengan objek dan daya tarik wisata berupa kehidupan desa yang memiliki ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam, budaya yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk komoditi bagi wisatawan. Masyarakat disini berperan sebagai pelaku utama dalam membangun kepariwisataan melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pokdarwis berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, menjadi wadah peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa kriteria desa wisata yakni:

- a) Dekat dengan objek wisata yang sudah ada
- b) Memiliki potensi wisata seperti potensi sumber daya alam, potensi budaya, potensi pertanian atau perkebunan)
- c) Keterbukaan masyarakat desa
- d) Aksesibilitas

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk pariwisata yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung, yang disajikan dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan tata cara dan tradisi setempat.

1.7.2.11 Peraturan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang

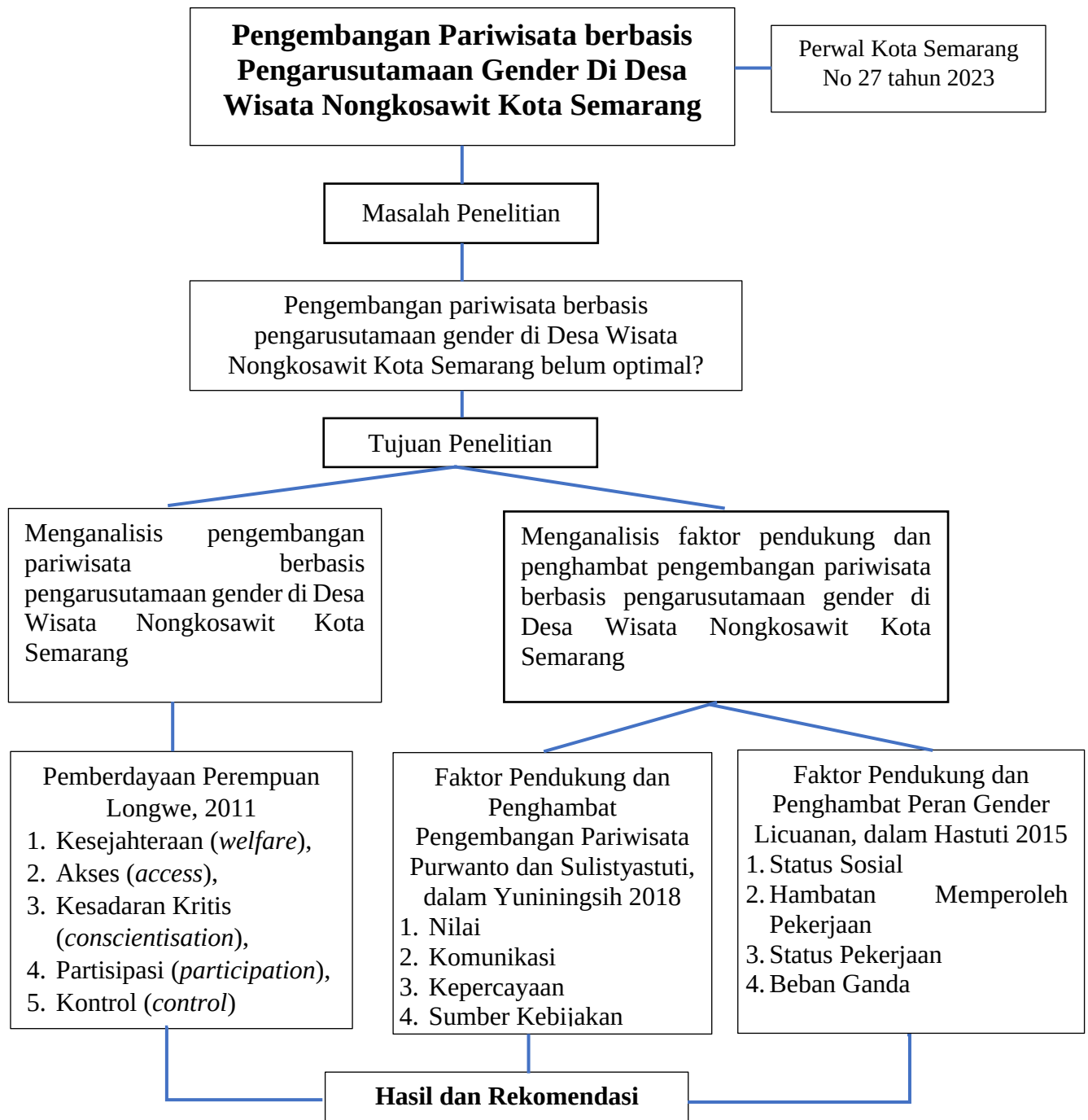
Peraturan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2021. Perda ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Peraturan ini mencakup komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua proses pembangunan daerah, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kebijakan.

Pengarusutamaan gender diatur melalui berbagai aspek seperti analisis gender dalam anggaran, pengembangan sarana prasarana yang responsif gender, serta pembinaan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Untuk mendukung

implementasi Perda ini, ada juga Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2023 yang mengatur tentang pelaksanaan Perda tentang Pengarusutamaan Gender. Perwali ini memberikan panduan tentang analisis gender, anggaran responsif gender, sarana prasarana, dan pemberian penghargaan yang menegakkan prinsip gender equality dalam semua kebijakan dan program pemerintah.

1.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti membutuhkan kerangka pemikiran untuk memudahkan penulisan penelitian yang sistematis dan terstruktur. Adapun kerangka pikir penelitian, sebagai berikut:



Gambar 1.15 Kerangka Pikir Penelitian

1.9 Operasionalisasi Konsep

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan adalah proses yang melibatkan berbagai pihak atau organisasi dalam bentuk kerja sama, kolaborasi, kompetisi, dan negosiasi. Proses ini menggunakan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan

transparansi untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan pihak berwenang. Selain itu, agar pengembangan pariwisata berjalan sesuai harapan maka dibutuhkan partisipasi masyarakat.

1. Pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender merupakan pengembangan pariwisata yang dianalisis menggunakan pengarusutamaan gender dengan metode analisis gender Longwe yang melihat kesetaraan dan keadilan perempuan melalui pemberdayaan perempuan.

a. Dimensi kesejahteraan

Dimensi kesejahteraan merupakan tercukupinya kebutuhan dasar yang dirasakan masyarakat dari hasil pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat (terpilah laki-laki dan perempuan).

- 1) Penghasilan yang setara antara laki-laki dan perempuan dari pengembangan pariwisata
- 2) Terpenuhinya kecukupan makan
- 3) Fasilitas kesehatan yang sama antara laki-laki dan perempuan
- 4) Adanya jaringan sosial

b. Dimensi akses

Dimensi akses merupakan kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan terhadap faktor-faktor produksi atau sumber daya, yaitu:

- 1) Jumlah tenaga kerja yang merata antara laki-laki dengan perempuan dalam pengembangan pariwisata,

- 2) Kesempatan yang sama dalam mengikuti pelatihan atau sosialisasi
- 3) Bantuan modal dana dalam mengembangkan usaha
- 4) Fasilitas promosi produk UMKM dan desa wisata dari Pemerintah
- 5) Layanan sertifikasi pemerintah

c. Dimensi Kesadaran Kritis

Dimensi kesadaran kritis merupakan keyakinan bahwa kesetaraan dan peran gender adalah budaya budaya yang dapat diubah. Perbedaan gender terjadi karena faktor-faktor sosial-budaya untuk keberadaan sebuah desa wisata yang mampu memberikan kesadaran kritis bagi perempuan.

- 1) Pemahaman masyarakat terkait peran dan hak gender yang sama
- 2) Sikap dan Cara pandang masyarakat terkait peran gender dan hak yang sama

d. Dimensi partisipasi

Dimensi partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan perempuan diarahkan pada organisasi kelompok kesadaran pariwisata sebagai bentuk partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan dan administrasi.

- 1) Peran Perempuan yang setara dengan laki-laki dalam pengelolaan wisata atau pokdarwis
- 2) Keterlibatan perempuan dalam pengembangan pariwisata

e. Dimensi kuasa/kontrol

Dimensi kuasa atau kontrol merupakan *empowerment* yang ditujukan

untuk distribusi kekuasaan atau kemampuan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan perempuan kesempatan untuk mengendalikan pembangunan desa melalui penyadaran dan mobilisasi untuk mencapai kesetaraan kendali atas faktor-faktor produksi dan distribusi manfaat.

- 1) Kekuasaan dalam pengambilan keputusan

- 2) Kesetaraan kontrol dalam pengelolaan pariwisata melalui pokdarwis

2. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit adalah faktor yang mempengaruhi implementasi pengarusutamaan gender dalam suatu kebijakan, program maupun kegiatan.

- a. Nilai adalah sesuatu yang ada dan dibawa oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

- 1) Nilai individu masyarakat desa wisata

- 2) Nilai profesional masyarakat desa wisata

- 3) Nilai organisasi masyarakat

- 4) Nilai legalitas

- 5) Nilai kepentingan publik

- b. Komunikasi, dilihat dari seberapa sering antar aktor saling berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi baik secara lisan maupun tertulis untuk mencapai tujuan bersama.

- 1) Interaksi antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata

- 2) Penyebaran informasi dan promosi

3) Penerimaan dan respon masyarakat

c. Kepercayaan, dilihat dari kepercayaan dari masing-masing aktor untuk menjalin kerjasama dengan aktor lain untuk mencapai tujuan bersama.

1) Kepercayaan terhadap *stakeholder*

2) Transparansi dalam pengelolaan dana

d. Sumber kebijakan, dilihat dari bagaimana kebijakan yang ada dalam mewadahi hubungan antar aktor atau jaringan yang terbentuk dalam mencapai tujuan bersama

1) Keberadaan regulasi dan pedoman pariwisata

3. Faktor pendukung dan penghambat peran gender dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit adalah faktor yang membatasi implementasi pengarusutamaan gender dalam suatu program pembangunan.

a. Status Sosial

Status sosial adalah kedudukan perempuan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh norma budaya, tingkat pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

1) Tingkat pendidikan

2) Norma budaya yang ada di masyarakat

b. Hambatan memperoleh pekerjaan

Hambatan memperoleh pekerjaan mengacu pada kesulitan yang dialami perempuan dengan membatasi peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dalam pengembangan pariwisata.

1) Ketersediaan peluang kerja

- 2) Tingkat partisipasi perempuan sama dengan laki-laki
- c. Status pekerjaan

Status pekerjaan dalam penelitian ini mengacu pada posisi yang dimiliki perempuan, baik dalam sektor formal maupun informal.

 - 1) Posisi gender pekerjaan dalam pengembangan pariwisata
- d. Beban Ganda

Beban ganda mengacu pada kondisi di mana perempuan harus harus membagi waktu antara pekerjaan produktif dan tanggung jawab domestik, yang dapat berdampak pada kesejahteraan dan produktivitas mereka.

 - 1) Jumlah jam kerja harian (di dalam dan di luar rumah)
 - 2) Fleksibilitas kerja dalam sektor pariwisata

1.10 Metode Penelitian

Menurut Creswell metodologi penelitian adalah kerangka kerja yang memberikan landasan teoritis dan praktis bagi seluruh kegiatan penelitian secara sistematis (Sina 2024). Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai suatu langkah atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan mengkaji informasi yang didapat guna memahami dan memecahkan masalah yang ingin diteliti. Pada setiap peneliti biasanya memiliki metode penelitiannya sendiri. Metode penelitian sendiri diartikan sebagai sekumpulan ilmu tentang tata cara (metode) yang tersusun dan masuk akal dalam mencari data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian tertentu.

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini berfokus pada pengamatan mendalam untuk mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata (Sahir, 2021). Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Umumnya, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dan studi dokumentasi. Dengan demikian, metode kualitatif memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena. Hal ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan individu yang terlibat.

Selain itu, penyusunan laporan menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian maupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran akurat dan sistematis tentang suatu fenomena pada saat tertentu (Sahir, 2021). Metode ini menggunakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi dan bagaimana keadaan suatu objek atau peristiwa. Sehingga dalam penyusunan laporan penelitian ini dapat mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari penelitian terkait Pengembangan Pariwisata Berbasis Pengarusutamaan Gender Di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

1.10.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan yang ditetapkan untuk menghindari kompleksitas yang berlebihan. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian tetap fokus pada inti permasalahan. Adapun batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang menggunakan teori Longwe untuk menganalisis pemberdayaan perempuan.
2. Kriteria perempuan sasaran PUG yang diteliti adalah perempuan yang sudah menikah dan perempuan yang masih dalam usia produktif sesuai dengan kriteria pada pasal 12 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023.

1.10.3 Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan sebagai penelitian. Dalam penelitian tentang Pengembangan Pariwisata berbasis Pengarusutamaan Gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang dilakukan di Desa Wisata Nongkosawit. Pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan pada data yang menyatakan bahwa Desa Wisata Nongkosawit merupakan desa wisata yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang paling rendah dibandingkan dengan Desa Wisata Wonolopo dan Desa Wisata Kandri di Kota Semarang.

1.10.4 Fenomena Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, pertama pertama menganalisis pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang menggunakan teori pemberdayaan perempuan Longwe. Kedua, menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang menggunakan teori faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan pariwisata Tri Yuniningsih serta Licuanan. Fenomena penelitian dijelaskan pada tabel berikut:

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian
1	Pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender	a. Dimensi Kesejahteraan , merupakan tercukupinya kebutuhan dasar yang dirasakan masyarakat dari hasil pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat (terpilah laki-laki dan perempuan).	1. Penghasilan yang setara antara laki-laki dan perempuan dari pengembangan pariwisata
			2. Terpenuhinya kecukupan makan
			3. Fasilitas kesehatan yang sama antara laki-laki dan perempuan
			4. Adanya jaringan sosial
		b. Dimensi Akses merupakan kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan terhadap faktor-faktor produksi atau sumber daya.	1. Jumlah tenaga kerja yang merata antara laki-laki dengan perempuan dalam pengembangan pariwisata
			2. Kesempatan yang sama dalam mengikuti pelatihan atau sosialisasi
			3. Akses yang sama mendapatkan bantuan modal dana dalam

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian
			mengembangkan usaha
			4. Fasilitas promosi produk UMKM dan desa wisata dari Pemerintah
			5. Layanan sertifikasi pemerintah
		c. Dimensi Kesadaran Kritis merupakan keyakinan bahwa kesetaraan dan peran gender adalah budaya budaya yang dapat diubah.	1. Pemahaman masyarakat terkait peran dan hak gender yang sama
			2. Sikap dan Cara pandang masyarakat terkait peran gender dan hak yang sama
		d. Dimensi Partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan perempuan diarahkan pada organisasi kelompok kesadaran pariwisata sebagai bentuk partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan dan administrasi.	1. Peran Perempuan yang setara dengan laki-laki dalam pengelolaan wisata atau pokdarwis
			2. Keterlibatan perempuan dalam pengembangan pariwisata
2	Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pariwisata berbasis Pengarusutamaan gender	e. Dimensi kontrol merupakan <i>empowerment</i> yang ditujukan untuk distribusi kekuasaan atau kemampuan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan perempuan kesempatan untuk mengendalikan pembangunan desa melalui penyadaran dan mobilisasi untuk mencapai kesetaraan kendali atas faktor-faktor produksi dan distribusi manfaat	1. Kekuasaan dalam pengambilan keputusan
			2. Kesetaraan kontrol dalam pengelolaan pariwisata melalui pokdarwis
		a. Nilai merupakan sesuatu yang ada dan dibawa oleh masing-masing pemangku kepentingan	1. Nilai individu masyarakat desa wisata
			2. Nilai profesional masyarakat desa wisata
			3. Nilai organisasi masyarakat
			4. Nilai legalitas
			5. Nilai kepentingan publik

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian
		b. Komunikasi , dilihat dari seberapa sering antar aktor saling berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi baik secara lisan maupun tertulis untuk mencapai tujuan bersama.	1. Interaksi antar <i>stakeholder</i> dalam pengembangan pariwisata
			2. Penyebaran informasi dan promosi
			3. Penerimaan dan Respon Masyarakat
		c. Kepercayaan , dilihat dari kepercayaan dari masing-masing aktor untuk menjalin kerjasama dengan aktor lain untuk mencapai tujuan bersama.	1. Kepercayaan terhadap <i>stakeholder</i>
			2. Transparansi dalam pengelolaan dana
		d. Sumber Kebijakan , dilihat dari bagaimana kebijakan yang ada dalam mewadahi hubungan antar aktor atau jaringan yang terbentuk dalam mencapai tujuan bersama.	1. Keberadaan regulasi dan pedoman pariwisata
3	Faktor Pendukung dan Penghambat Pengarusutamaan Gender	a. Status Sosial adalah kedudukan perempuan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh norma budaya, tingkat pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi	1) Tingkat pendidikan 2) Norma budaya yang ada di masyarakat
		b. Hambatan memperoleh pekerjaan mengacu pada kesulitan yang dialami perempuan dengan membatasi peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dalam pengembangan pariwisata	1) Ketersediaan peluang kerja 2) Tingkat partisipasi perempuan
		c. Status pekerjaan mengacu pada posisi yang dimiliki perempuan, baik dalam sektor formal maupun informal	1) Posisi gender pekerjaan dalam pengembangan pariwisata
		d. Beban ganda mengacu pada kondisi di mana perempuan harus harus membagi waktu antara pekerjaan produktif dan tanggung jawab domestik, yang dapat berdampak pada kesejahteraan dan produktivitas mereka	1) Jumlah jam kerja harian (di dalam dan di luar rumah) 2) Fleksibilitas kerja dalam sektor pariwisata

1.10.5 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157-158) dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah kata-kata ataupun tindakan seperti wawancara, sumber tertulis, foto dan data statistik. Biasanya untuk memperoleh data kualitatif, peneliti membutuhkan dua sumber data. Sumber data primer, dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari tangan pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang sudah ada.

a) Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang dikumpulkan langsung dari sumber utamanya. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, survei, *forum group discussion* (FGD) dan hasil observasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Ketua Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit, masyarakat sekitar, dan Lurah Nongkosawit yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti buku, catatan, dokumen, arsip, atau bukti lain yang sudah ada, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum tersebar luas. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai dokumen, peraturan, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, berita, serta informasi dari internet yang relevan dengan topik penelitian.

1.10.6 Pemilihan Informan

Informan penelitian merupakan individu maupun kelompok yang berperan sebagai penyedia data informasi yang paham dengan fenomena yang akan diteliti sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Dalam memilih informan penelitian dapat dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono 2018). Sedangkan teknik *snowball* merupakan teknik memilih sampel secara sadar sesuai kebutuhan berdasarkan informasi dan rekomendasi dari informan sebelumnya sampai seterusnya (Sugiyono 2018).

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan menggunakan teknik *snowball*. Teknik *Snowball* ini digunakan untuk menentukan informan berikutnya berdasarkan rekomendasi dari *key informan* (informan kunci) yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. *Key informan* (informan kunci) dalam penelitian ini adalah Ketua Pokdarwis Kandang Gunung Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, perempuan yang dipilih sebagai informan harus sesuai dengan kriteria sasaran PUG, yaitu sudah menikah maupun yang belum menikah, serta perempuan dalam usia produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023.

Tabel 1.9 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Peran	Keterangan
1	Pemerintah	1	1) Lurah Nongkosawit	Informan 1
2	Masyarakat	8	1) Ibu-Ibu Anggota Karawitan (6 orang)	Informan 2
			2) Perwakilan UMKM Desa Wisata Nongkosawit	Informan 3
			3) Perwakilan Karang Taruna	Informan 4
3	Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit	2	1) Ketua Pokdarwis	Informan 5
			2) Anggota Pokdarwis	Informan 6

Sumber: Data Diolah Peneliti

1.10.7 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Kemudian peneliti juga menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data berupa: kamera, dokumen, dan pedoman wawancara yang berisi catatan garis besar dan singkat mengenai hal-hal yang perlu untuk ditanyakan.

1.10.8 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena inti dari penelitian adalah memperoleh data. Sugiyono juga mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di lingkungan alami (natural setting) dengan memanfaatkan sumber data primer (Sugiyono 2018). Teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi:

a. Observasi

Observasi dilakukan di awal penelitian sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan wawancara di tahap berikutnya. Adanya modal

observasi ini juga dapat dilakukan penanyaan secara langsung dengan sinkronisasi kenyataan di lapangan dengan pertanyaan yang nantinya akan diajukan. Observasi adalah pengamatan langsung untuk mendapatkan data. Instrumennya berupa pedoman pengamatan, bias berbentuk daftar jenis kegiatan yang akan terjadi/diamati serta menggunakan sistem pengamatan tanda yang berupa gambaran singkat situasi tertentu. Melalui observasi tersebut, penulis dapat memahami konteks data dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu peneliti dapat melakukan observasi secara langsung untuk memperoleh bukti data yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pada observasi ini peneliti melakukannya dengan cara merekam informasi dan memfoto terkait fenomena pengembangan pariwisata yang ada di Desa Wisata Nongkosawit. Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan informan, peneliti melakukan observasi ke Omah Pang yang merupakan tempat berkumpulnya Pokdarwis Kandang Gunung untuk bertukar pikiran dan peneliti berkeliling Desa Wisata Nongkosawit untuk melihat bagaimana infrastruktur, keadaan masyarakat, sarana dan prasarana dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit.

b. Wawancara,

Tahapan selanjutnya dengan adanya modal observasi di lapangan maka dalam proses wawancara ini peneliti dapat melakukan pengecekan terhadap informasi yang disampaikan oleh informan dengan kondisi

observasi yang telah dilakukan. Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber. Wawancara ini yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan model interview guide terpimpin yakni wawancara menggunakan pedoman pertanyaan lengkap dan terperinci melalui kuesioner terbuka dan kuesioner langsung.

- 1) Kuesioner terbuka berisi pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang dikehendaki dengan kata-kata yang dipilih sendiri.
- 2) Kuesioner langsung, responden atau objek penelitian menjawab pertanyaan seputar dirinya.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara diijinkan membuat pertanyaan lebih fleksibel, arah pertanyaan lebih terbuka, namun tetap terkonsentrasi, sehingga diperoleh informasi yang mendalam tetapi tidak kaku. Wawancara pertama dilakukan dengan Ketua Pokdarwis Kandhang Gunung Bapak Suwarsono untuk menentukan informan selanjutnya peneliti menggunakan teknik *snowball*.

c. Indepth interview

Wawancara dengan informan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam yang digunakan untuk mencari jawaban pertanyaan yang tidak tercantum dalam angket.

d. *Forum Group Discussion* (FGD)

Forum Group Discussion (FGD) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi kelompok yang terarah, dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan, pendapat, atau informasi mendalam dari peserta terkait topik tertentu. FGD sering digunakan dalam penelitian sosial untuk menggali pemahaman bersama atau memperkaya data kualitatif dengan melibatkan interaksi antar anggota kelompok.

Dalam penelitian ini, metode FGD digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kontribusi para ibu-ibu anggota karawitan yang berperan sebagai pelaku wisata di Desa Wisata Nongkosawit, Kota Semarang. Diskusi ini difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana keterlibatan mereka dalam kegiatan wisata memengaruhi pengembangan desa wisata tersebut, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi.

e. Studi Literatur

Teknik yang dijalankan secara beriringan di dalam penelitian dengan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi memiliki peran dalam memperkuat informasi dari hasil wawancara dan observasi selama penelitian berlangsung. Peneliti menambahkan sumber informasi melalui studi literatur dokumentasi untuk berupa dokumen berbentuk publikasi dari Pokdarwis Kandang Gunung maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, buku, artikel jurnal, media sosial (*instagram*, *Penta-Klabs* dan *Exovillage*) serta surat kabar elektronik.

Hasil dari dokumentasi dapat dijadikan sebagai bukti valid dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan yang disatukan ke dalam matriks penelitian untuk mempermudah peneliti menganalisa hasil wawancara. Setelah menyusun matriks penelitian kemudian melakukan triangulasi sebagai langkah pengecekan validitas dan keabsahan antara data dan sumber. Hasil dari keseluruhan penelitian yang memiliki kesamaan maka hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan penelitian.

1.10.9 Teknik Analisis Data

Menurut Moloeng (2007: 248) analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasi data, mengkategorikan ke dalam unit-unit yang dikelola, menyusunnya, mencari dan menemukan pola, menemukan hal-hal penting dan belajar, serta memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain.. Sementara, menurut Mulyana dalam (Rahayu, 2011) realitas dunia tersebut bersifat inter subyektif yang berarti bahwa anggota masyarakat berbagai persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi dan komunikasi. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab berbagai tujuan penelitian dan merekonstruksi fenomena yang dialami dalam pengembangan pariwisata berbasis pengarusutamaan gender di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

Berikut merupakan langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam pengolahan data sesuai yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman

(2014) yang mengatakan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu:

1. Pengumpulan Dat

Pengumpulan data adalah tahap di mana peneliti mengumpulkan informasi melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dalam proses ini, peneliti dapat mencatat pola awal atau membuat refleksi mengenai temuan sementara yang mungkin relevan dengan penelitian.

2. Kondensasi Data

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah kondensasi data. Ini merupakan proses analisis awal di mana data yang telah dikumpulkan diseleksi, disederhanakan, dan dikategorikan berdasarkan tema tertentu. Tujuan dari tahap ini adalah menyaring informasi yang paling penting agar hasil penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Dengan begitu, peneliti dapat lebih mudah menginterpretasikan data dan menyusun kesimpulan yang lebih akurat.

3. *Display* atau Penyajian Data

Penyajian data adalah cara mengorganisir informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel, diagram, grafik, atau ringkasan. Penyajian yang jelas membantu dalam menganalisis data kualitatif secara akurat. Dengan menyusun data dengan baik, peneliti dapat lebih mudah menarik kesimpulan dan mengambil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dan verifikasi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian yang melibatkan data gambar, kesimpulan dan verifikasi dapat dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber atau literatur yang relevan. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang telah diringkas dan tetap mengacu pada tujuan penelitian. Data yang tersedia dibandingkan satu sama lain agar dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap masalah yang diteliti.

Lebih lanjut penelitian akan menggunakan *Nvivo* sebagai metode analisis data. *Nvivo* merupakan sebuah aplikasi komputer buatan *QSR International* yang digunakan untuk mengolah data kualitatif. Aplikasi ini dirancang untuk membantu menganalisis data penelitian yang berbentuk teks dan multimedia, baik dalam jumlah kecil maupun besar.



Gambar 1.16 Data Analysis Process
Sumber: (Baharuddin, Qodir, and Loilatu 2022)

1.10.10 Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data penelitian perlu dilakukan akurasi data yang didasarkan sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Berbentuk validitas internal (alat ukur mencerminkan objek yang diukur) dan validitas eksternal (alat ukur dipakai pada penelitian berbeda). Keabsahan penelitian kita uji kualitasnya dengan cara melakukan Uji Kredibilitas yang menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moelong (2007:330) teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan isi lain (untuk kebutuhan pemeriksaan atau perbandingan dengan data) selain data itu sendiri dengan cara memeriksa sumber lain. Sedangkan menurut William Wiersma (dalam (Sugiyono, 2018)) mengartikan bahwa triangulasi sebagai pemeriksaan data dari sumber, metode, dan waktu. yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah uji validitas dengan memeriksa data yang didapat dari berbagai sumber.

b. Triangulasi Metode

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode untuk menjamin kualitas data dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan survei. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan gambaran yang lebih lengkap mengenai suatu hal. Dalam prosesnya, wawancara dan observasi digunakan untuk memastikan kebenaran data. Selain itu, peneliti juga membandingkan informasi dari berbagai

narasumber untuk menguji keakuratan data. Dengan melihat dari berbagai sudut pandang, hasil penelitian diharapkan lebih mendekati kebenaran.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mengecek ulang data dari sumber yang sama menggunakan metode yang sama, tetapi pada waktu atau kondisi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang didapat tetap konsisten dan akurat.

d. Triangulasi teknik

Triangulasi teknis adalah tes kredibilitas yang menggunakan wawancara, kemudian melalui studi pustaka, dokumentasi dan observasi, melalui teknik yang berbeda untuk mengecek data dari sumber yang sama.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menguji validitas data. Triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, sementara triangulasi metode menggunakan wawancara dan observasi untuk memastikan keakuratan informasi dengan melibatkan orang yang berbeda. Namun tetap sesuai dengan kriteria informan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sah dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, validitas data dikonfirmasi dengan menganalisis hasil wawancara, membandingkannya dengan kondisi di lapangan melalui observasi dan dokumentasi.